



# LAPORAN KEGIATAN

## ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE TAHUN 2018



**Disusun oleh Evaluator :**

- 1. Endang Murtiningsih (*Quality Assurance*)**
- 2. Damarsasi (Ketua)**
- 3. Sasmita Nugraha**
- 4. Diah Rachmi D.**



## Daftar Isi

BAB I . Pendahuluan .....	5
BAB II. Data Umum Perusahaan .....	7
BAB III. Ringkasan Hasil Evaluasi .....	9
BAB IV. Improvement dan Rekomendasi.....	11
BAB V. Penutup .....	23
LAMPIRAN .....	24

## Ringkasan Eksekutif

*Assessment* implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Kaltim Industrial Estate dilaksanakan dengan menggunakan kriteria berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN, bertujuan untuk menilai implementasi GCG pada Perusahaan meliputi enam aspek pokok yaitu:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek Lain.

Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa *assessment* penerapan GCC ini tidak ditujukan untuk membandingkan capaian penerapan praktik-praktik GCG antar Organ Perusahaan, yaitu antara Direksi dengan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham.

Berdasarkan *assessment* penerapan praktik-praktik GCG yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG Tahun 2018 pada PT Kaltim Industrial Estate mencapai skor 76,068. Capaian skor untuk masing-masing aspek *governance* terinci sebagai berikut :

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian		Predikat
			Aktua I	(%)	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	7	4,616	65,94%	Cukup baik
II	Pemegang Saham Dan Rups/Pemilik Modal	9	7,309	81,21%	Baik
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35	28,463	81,32%	Baik
IV	Direksi	35	29,872	85,35%	Sangat Baik
V	Pengungkapan Dan Keterbukaan Informasi	9	5,809	64,54%	Cukup Baik
VI	Aspek Lainnya	5	0,000		
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>76,068</b>	<b>76,068 %</b>	<b>Baik</b>



Rekomendasi terhadap area-area yang perlu penyempurnaan kami sampaikan secara lebih rinci dalam bagian lampiran laporan ini.

Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG ini, tidak akan berarti apapun apabila tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya tindak lanjut atas rekomendasi yang didasari dengan komitmen semua pihak yang terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices*, yang terus berkembang.

Bontang, Maret 2019

PT Pupuk Kalimantan Timur

**Endang Murtiningsih**  
*Quality Assurance*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Pengembangan dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan wujud komitmen PT Kaltim Industrial Estate untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra perusahaan yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*) pada BUMN, disebutkan pada BAB XII Pasal 44 bahwa BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:

- 1) Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
- 2) Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf 1, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

### **2. DASAR PENUGASAN**

- 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/ 2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Keputusan Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance*).
- 3) Arahan Keputusan RUPS PT KIE
- 4) Surat PT KIE ke PT Pupuk Kaltim Nomor: 02.01/DU/KIE-B/XII/2018 perihal Assessment GCG KIE 2018 pada tgl 05 Desember 2018



- 5) Surat Direktur SDM dan Umum PT Pupuk Kaltim No: 1026/D5000-Btg/XII.2018 perihal Konfirmasi permintaan pelaksanaan asesmen GCG dan Manajemen Risiko 2018 tanggal 20 Desember 2018

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria nyata yang diterapkan pada PT KIE.
2. Meningkatkan komitmen PT KIE dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
3. Mengukur konsistensi seluruh parameter yang sudah baik dalam implementasinya.

### **4. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari kegiatan ini berfokus pada seluruh parameter Sesuai SK-16/S.MBU/2012 dan penyebaran kuesioner.

### **5. METODOLOGI**

Metodologi yang digunakan adalah:

1. Reviu dokumen.
2. Kuesioner.
3. Wawancara.
4. Observasi.

Seluruhnya mengacu pada penilaian terhadap 6 Aspek, 43 Indikator, 153 Parameter dan 568 Faktor Uji Kesesuaian/FUK sebagaimana ketentuan yang diatur dalam SK-16/S.MBU/2012. *Scoring* akhir yang dihitung oleh tim melalui proses penjaminan mutu.

### **6. JADWAL PELAKSANAAN**

- 1) Evaluasi : Tanggal 10 Januari sampai dengan 27 Februari 2019
- 2) Pra Ekspose Assessment GCG 2018 tanggal 23 Februari 2019.
- 3) Final Ekspose Assessment GCG 2018 tanggal 27 Februari 2019

## BAB II DATA UMUM PERUSAHAAN

### a. Profil Perusahaan

PT Kaltim Industrial Estate (PT KIE) didirikan pada tanggal 29 Agustus 1990 di Bontang oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (PT Pupuk Kaltim). Awalnya KIE bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri yang menyediakan lahan bagi berbagai perusahaan berbasis gas bumi di kawasan Bontang dan sekitarnya. Kini setelah lebih dari 25 tahun, PT KIE telah berkembang menjadi diversified firm yang berbasis lima pilar bisnis yakni: Kawasan Industri, Rekayasa dan Kontruksi, Properti, Beton dan Trading. Komitmen jajaran Pimpinan PT KIE untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses bisnis dan memahami kebutuhan konsumen, serta dukungan penuh PT Pupuk Kaltim merupakan faktor kunci keberhasilan PT KIE dalam mengembangkan bisnis-bisnis ini. Sertifikasi ISO 9001 dan 14001 yang dimiliki merupakan bukti kepedulian pimpinan KIE terhadap kualitas, tidak saja kualitas proses bisnis, tapi juga kualitas lingkungan. Strategi KIE untuk mengembangkan bisnis dan upaya untuk memanfaatkan kesempatan pasar yang ada senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai profesionalisme, integritas dan penekanan pada kepuasa mitra bisnis.

### b. Komposisi Kepemilikan Saham

PT KIE merupakan anak perusahaan PT Pupuk Kaltim, dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Yayasan Kesejahteraan Hari Tua PT Pupuk Kaltim dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%.

PT KIE merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan lahan industri dengan luas  $\pm 230$  ha dan berbagai fasilitas pendukung, termasuk sarana pengolahan limbah serta gedung perkantoran.

PT KIE memiliki saham atas beberapa anak perusahaan dan perusahaan afiliasi.

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
1	Kaltim Daya Mandiri	Bisnis PT KDM adalah produksi dan distribusi listrik, dengan kapasitas 34MW, serta menyediakan steam, nitrogen, dan demineralized water.
2	PT Kaltim Jasa Sekuriti	Jasa security mulai dari proses rekrutment, pelatih personil, SOP tugas dan penjagaan sampai dengan evakuasi dan laporan hasil pengamanan.
3	PT Pukati Niaga Sejahtera	Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor-impor bahan pertanian dan perkebunan, kegiatan distribusi, energy dsb.
4	PT Pukati Pelangi Bahana Agropolitan	Perusahaan perdagangan yang memiliki keahlian khusus terutama di bidang impor, ekspor, serta

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha
		pemasaran berbagai produk pupuk non-subsidi di seluruh Indonesia.
5	PT Bintang Sintuk Hotel	Hotel bintang tiga di Bontang.
6	PT Kaltim Adhiguna Dermaga	Perusahaan bongkar muat dari/ke kapal barang-barang hasil produksi Pupuk Kaltim yang dibongkar/muat pelabuhan khusus Pupuk Kaltim dan pelabuhan lainnya.

### c. Visi, Misi Perusahaan

#### Visi

Menjadi Perusahaan yang sehat dan stabil secara keuangan, melalui peningkatan efisiensi dan mengoptimalkan sinergi bisnis, dan tumbuh secara berkelanjutan melalui perluasan pasar.

#### Misi

- Memanfaatkan secara optimal kompetensi dan jaringan bisnis yang ada dalam portofolio untuk kepuasan konsumen dan pengembangan bisnis.
- Mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dalam pengelolaan bisnis
- Mengembangkan bisnis untuk peningkatan Corporate Value atas portofolio bisnis dengan tetap berprinsip pada sustainable development.
- Melakukan semua kegiatan operasi perusahaan yang berorientasi pada kaidah manajemen modern dan operational excellence
- Meningkatkan nilai tambah yang optimal serta berkelanjutan bagi shareholder dan stakeholder

### d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

#### Susunan Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Suldja Hartono
- Komisaris : Agus Subekti
- Komisaris : Amrullah Andi Mapparuwa

#### Susunan Direksi

- Direktur Utama : Iliana Arifiandi
- Direktur Operasi : Wahyuda Prakasa J.S
- Direktur Keuangan : Plt. Muhammad Erriza
- Direktur Pengembangan Bisnis : Muhammad Erriza



## BAB III RINGKASAN HASIL EVALUASI

### 1) Skor Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi GCG tahun 2018, aspek I mengalami penurunan dari nilai 5.186 (74.09%) dengan predikat cukup baik menjadi **4,616 (65,94%) dengan predikat cukup baik**, aspek II dengan capaian nilai **7,309 (81,21%) dengan predikat baik**, aspek III mengalami kenaikan yang cukup banyak dari nilai 25,693 (73,41%) dengan predikat baik menjadi **28,463 (81,32%) dengan predikat baik**, aspek IV mengalami kenaikan dari nilai 26,777 (76,51%) dengan predikat baik menjadi **29,872 (85,35%) dengan predikat sangat baik** dan aspek V dengan capaian nilai **5,809 (65,54%) dengan predikat cukup baik**.

#### Tahun 2016

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian		Predikat	Jumlah AoI
			Aktual	(%)		
I	KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN GCG	7	4,571	65,31%	Cukup Baik	21
II	PEMEGANG SAHAM	9	7,529	83,66%	Baik	12
III	DEWAN KOMISARIS	35	18,360	52,46%	Kurang Baik	96
IV	DIREKSI	35	26,777	76,51%	Baik	71
V	PENGUNGKAPAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI	9	3,278	36,42%	Tidak Baik	64
	Sub Total	95				
VI	Aspek Lainnya	5				12
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>60,516</b>	<b>60,52%</b>	<b>Cukup Baik</b>	<b>276</b>

Tahun 2017

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian		Predikat	Jumlah AoI
			Aktual	(%)		
I	KOMITMEN	7	5.186	74.09%	Cukup baik	19
II	PEMEGANG SAHAM	9	7.236	80.40%	Baik	16
II I	DEWAN KOMISARIS	35	25.693	73.41%	Cukup Baik	61
IV	DIREKSI	35	29.408	84.02%	Baik	52
V	PENGUNGKAPAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI	9	2.755	30.61%	Tidak Baik	63
	Sub Total	95				
VI	Aspek Lainnya	5				12
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>70.279</b>	<b>70,28%</b>	<b>Cukup Baik</b>	<b>223</b>

Tahun 2018

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian		Predikat	Jumlah AoI
			Aktual	(%)		
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	7	4,616	65,94%	Cukup baik	19
II	Pemegang Saham Dan Rups/Pemilik Modal	9	7,309	81,21%	Baik	17
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35	28,463	81,32%	Baik	49
IV	Direksi	35	29,872	85,35%	Sangat Baik	46
V	Pengungkapan Dan Keterbukaan Informasi	9	5,809	64,54%	Cukup Baik	30
VI	Aspek Lainnya	5	0,000			
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>76,068</b>	<b>76,068 %</b>	<b>Baik</b>	<b>161</b>

## 2) Daftar Capaian Hasil Evaluasi

No.	Aspek	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		FUK =1	FUK < 1	FUK =1	FUK < 1	FUK =1	FUK < 1
1	I	26	21	28	19	29	19
2	II	56	12	52	16	51	17
3	III	71	96	106	61	118	49
4	IV	131	71	150	52	156	46
5	V	12	64	13	63	46	30
6	VI	0	12	0	12	0	12
	<b>Total</b>	<b>296</b>	<b>276</b>	<b>349</b>	<b>223</b>	<b>400</b>	<b>173</b>

Dari hasil evaluasi terdapat penurunan jumlah AoI dari semula tahun 2017 sebanyak 223 Faktor Uji Kesesuaian (FUK) menjadi 161 FUK.

## BAB IV IMPROVEMENT DAN REKOMENDASI

Atas hasil evaluasi terdapat parameter yang nilainya masih di bawah satu. Skor pada parameter terbentuk dari skor pada faktor uji. Rekomendasi dari hasil kajian adalah melakukan improvement terhadap faktor uji yang dianggap belum memenuhi kriteria dalam SK 16.

### III. 1. Improvement

Berikut improvement secara umum yang sudah dilakukan oleh PT. Kaltim Industrial Estate dari seluruh Parameter yang ada

<b>Aspek I : KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN</b>	
1	PT KIE sudah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan sesuai SKD No: 01/SKD/DIR/I-2015 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 21 Januari 2015
2	PT KIE sudah memiliki Pedoman Perilaku ( <i>Code of Conduct</i> ) sesuai dengan SKD No: 01/SKD/DIR/I-2015 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada tanggal 21 Januari 2015
3	Perusahaan telah memiliki Direktur penanggung jawab GCG yaitu Direktur Keuangan berdasarkan surat Direktur Utama No:04.02/DU/KIE-B/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017.
4	Perusahaan telah membuat laporan mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada pemegang saham melalui surat Dirut PT KIE Nomor: 01.01/DPB/KIE-B/I/2019
5	Perusahaan telah memiliki Board Manual (Includ Pedoman Direksi dan Dekom) tahun 2015 dan sudah disahkan oleh Direksi pada 21 Januari 2015. Pedoman GCG yg dimiliki perusahaan antara lain Code GCG, Board Manual yg mengatur prinsip-prinsip hubungan antar Organ perusahaan, hubungan kerja Direksi & Dekom, mengatur tentang organ utama perusahaan yaitu Direksi, Komisaris, Komite Komisaris & Sekretaris Komisaris. Kebijakan lain yang telah ada antara lain Kebijakan IT , Kebijakan MR, Piagam SPI, Code Of Conduct. Telah ada pelaksanaan komunikasi/sosialisasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung dan pejabat setingkat di bawah Direksi yang dapat dilakukan melalui ceramah/seminar/rapat, website.
6	Perusahaan sudah memiliki kebijakan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam pedoman perilaku, antara lain : SK Direksi Nomor : 10/DIR/VIII-2016 tentang Tata Tertib , Disiplin Kerja dan Sanksi, Perusahaan juga sudah memiliki WBS yaitu pelaporan dugaan pelanggaran terhadap kode etik perusahaan pada alamat kie.co.id
7	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT KIE serta karyawan sudah menandatangani Piagam Pakta Integritas/komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku;

8	PT KIE telah melakukan asesmen penerapan GCG tiap tahun yang dilakukan oleh PT PKT dari tahun 2016
9	Kontrak Manajemen PT KIE telah mencantumkan KPI mengenai pelaksanaan GCG dan ditandatangani oleh PS, Dekom dan Direksi
10	Perusahaan telah memiliki aplikasi WBS pada alamat <a href="https://lapor.kie.co.id">https://lapor.kie.co.id</a>

No.	Aspek II : PEMEGANG SAHAM
1	Pemegang Saham telah memiliki pedoman pengangkatan dan pemerhentian Direksi yang tertuang pada SK DIR No: 25/DIR/VII-2017 tentang Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT Pupuk Kalimantan Timur (halaman 9). Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi sesuai lampiran SK DIR No: 25/DIR/VII-2017 sudah memuat mekanisme penjangkaran dan prosedur fit and proper
2	Pemegang Saham/Pemilik Modal telah merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.
3	RUPS mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.
4	RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil, RUPS dihadiri oleh aseluruh pemegang saham.
5	Terdapat Pedoman laporan tahunan diatur dalam pedoman tata kelola Anper pasal 6 poin C tentang pelaporan pelaksanaan RKAP dan format Laporan pelaksanaan RKA. Pemegang telah memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dekom tepat waktu.
6.	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal telah menetapkan pedoman penyusunan RJPP. Pedoman RJPP Anper ditetapkan melalui SK Dir No: 25/DIR/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017. Pemegang Saham mengesahkan RJPP PT KIE 2016-2020 pada tanggal 22 Januari 2018.
7	Terdapat pedoman penilaian KPI Direksi dan Dekom PT KIE pada SK Dir No: 25/DIR/VII/2017 yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2017. Terdapat kontrak manajemen yang memuat target kinerja kolegal dan individu. Penilaian Kineja dituangkan dalam risalah RUPS
8	Penetapan tantiem dan insentif Dekom dan Direksi telah ditetapkan pada Keputusan Pemegang Saham PT KIE diluar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

No.	Aspek III : DEWAN KOMISARIS
1	Anggota Dekom yang baru mengikuti program pengenalan yang diadakan oleh Perusahaan pada tanggal 27 Agustus 2017 di Hotel Equator dengan menyampaikan dokumen berupa : anggaran dasar PT KIE, laporan kinerja, laporan manajemen tahunan, buku pedoman GCG, board manual, pedoman kode etik dan seluruh anggota Dekom yang baru hadir dalam proses pengenalan.
2	Dekom telah menyusun rencana kerja anggaran tahunan dan melaporkan secara tertulis kepada PS.
3	Dekom telah memberikan arahan perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan.
4	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan sesuai surat keputusan Dekom No: KEP-01/DEKOM/KIE/VII/2017 Tentang Pembagian Tugas Dekom PT KIE.
5	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS/Pemilik Modal
6	<p>Dekom sudah memiliki kebijakan yang tertuang dalam SK Dekom No. : KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan mengenai tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi yaitu 7-14 hari halaman 3 no 4(c)</li> <li>b. Kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris halaman 4 no 5</li> <li>c. kebijakan tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi halaman 5 no 6.</li> <li>d. kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/ tanggapan/ pendapat Dekom terhadap RJPP halaman 7 no 7</li> <li>e. kebijakan mengenai pelaksanaan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dekom terhadap rancangan RKAP halaman 7 no 8</li> <li>f. kebijakan mengenai Pemantauan Perubahan Lingkungan Bisnis yang berdampak pada usaha perusahaan halaman 8 no 9</li> <li>g. kebijakan dalam merespon saran, permasalahan, atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada Direksi halaman 9 no 10</li> <li>h. kebijakan atas rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya halaman 9 no 11</li> <li>i. kebijakan atas rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya halaman 10 no 12</li> <li>j. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya pada halaman 11 no 13</li> <li>k. kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan sumber daya manusia halaman 12 no 14</li> <li>l. kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi halaman 13 no 15</li> </ol>

No.	Aspek III : DEWAN KOMISARIS
	<p>m. kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya hal 14 no 16</p> <p>n. kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut no 17</p> <p>o. kebijakan atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga no 18</p> <p>p. kebijakan atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP tersebut no 19</p> <p>q. kebijakan mengenai mekanisme bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar tersebut no 20</p> <p>r. kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal tersebut no 21</p> <p>s. kebijakan mengenai terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi no 22</p> <p>t. Kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan no 23</p> <p>u. kebijakan atas pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan no 24</p> <p>v. Kebijakan terkait Benturan Kepentingan Dewan Komisaris no 25</p> <p>w. kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik no 26</p> <p>x. Kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas no 27</p>
7	Telah terdapat komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
8	Telah terdapat Piagam Komite Audit yang telah disahkan dengan No. KEP-03/DEKOM/KIE/III.2017 tanggal 29 Maret 2017. Untuk piagam Komite GCG, PMR dan Investasi ditetapkan melalui SK Dekom KEP-01/DEKOM/KIE/X/2018
9	Sekretariat Dekom telah melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.

No.	Aspek IV : DIREKSI
1	Perusahaan telah memiliki Kebijakan tentang pelatihan bagi Direksi yang tertuang dalam SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dewan Direksi PT KIE poin 2 halaman 3.
2	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait mekanisme pengambilan keputusan Direksi yang tertuang pada SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 lampiran poin 3 tentang Kebijakan Pengambilan Keputusan Dewan Direksi
3	Direksi telah memiliki standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi yaitu 5-7 hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima lengkap sesuai SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 lampiran no 3 tentang Kebijakan Pengambilan Keputusan Dewan Direksi poin c .
4	Perusahaan telah memiliki kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai sesuai SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 tanggal 21 Desember 2017 lampiran poin 4 tentang Kebijakan Penyusunan RJPP Untuk RJPP tahun 2016-2020 telah disahkan pada 22 Januari 2018 dalam RUPS kinerja thn 2017 namun penyampaian rancangan RJPP sudah terlambat. RJPP telah disosialisasikan ke seluruh karyawan
	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran yang tertuang pada SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 lampiran no 5 tentang Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Direksi. Direksi menyampaikan rancangan RKAP tahun 2018 kepada Pemegang Saham pada tanggal 28 September 2017 sesuai surat Dirut KIE kepada PS No; 32.01/DU/KIE-B/IX/2017 dan sudah dilakukan telaah oleh Dekom sesuai Surat Dirut kepada Dekom tanggal 19 September 2017 Nomor ; 30.01/DU/KIE-B/IX/2017
	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.
3	Semua program/kegiatan yang dilaksanakan perusahaan telah sesuai dengan RKAP dan telah melalui mekanisme yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi pada saat rapat koordinasi yang dilaksanakan tiap bualan yang diikuti Direksi, Kepala Divisi , Manager dan Serikat Pekerja
4	Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolegal Direksi setiap bulan dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dengan cc Dekom
5	Dalam rapat direksi dan organ perusahaan, dibahas usulan peluang bisnis kemudian Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris tentang usulan peluang disertai dengan studi kelayakan



No.	Aspek IV : DIREKSI
	dan membahasnya dengan Dewan Komisaris.
6	Perusahaan sudah memiliki kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam bentuk uraian jabatan, dan setiap tingkatan jabatan sudah memiliki KPI di unit kerja masing-masing tertuang dalam SK Direksi nomor 34/DIR/XI-2015 tentang penilaian KPI tanggal 11 November 2015.
7	PT KIE telah memiliki kebijakan SK Nomor: 27/SKD/DIR/XII-2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Anak Perusahaan (Subsidiary Governance) dan Perusahaan patungan PT KIE tanggal 21 Desember 2017
8	PT KIE sudah memiliki kebijakan Mutu yang ditandatangani oleh Dirut PT KIE tanggal 6 Februari 2018 sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 tahun 2008. Sistem pengendalian mutu diterapkan secara konsisten dan secara berkala sistem mutu diaudit dan perusahaan sudah menindak lanjuti setiap ketidaksesuaian mutu
9	PT KIE sudah memiliki kebijakan mengenai penerapan remunerasi dan kesejahteraan yang tertuang didalam SK DIR No: 16/SKD/DIR/X-2017 tentang sistem pengupahan berbasis kompetensi dan kinerja tanggal 2 Oktober 2017. Kebijakan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (karyawan dan keluarga sudah diikutkan program BPJS dan kapitasi YRS PKT).
10	Perusahaan sudah memiliki kebijakan terkait Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang disahkan oleh Dirut pada tanggal 6 Februari 2018. Perusahaan sudah memberikan fasilitas kesehatan terhadap pekerja dan keluarga. Alat keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3 serta fasilitas kesehatan di lingkungan kerja sudah tersedia di perusahaan, perusahaan juga sudah melakukan evaluasi terhadap K3 serta menindaklanjuti hasil evaluasi.
11	Perusahaan telah memiliki Kebijakan tentang pelatihan bagi Direksi yang tertuang dalam SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 lampiran no 2
12	Perusahaan telah memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan Perusahaan yang tertuang dalam SK Direksi Nomor: 14/DIR/X-2017 tentang Struktur Organisasi. Semua jabatan dalam struktur organisasi tidak ada yang kosong, hanya Ka SPI definitive belum ada tapi dijabat oleh pelaksana tugas.
13	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait mekanisme pengambilan keputusan Direksi yang tertuang pada SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 lampiran no 3 tentang Kebijakan Pengambilan Keputusan Dewan Direksi, tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi adalah 5-7 hari kalender sejak dokumen persyaratan diterima
14	Perusahaan telah memiliki kebijakan Penyusunan RJPP sesuai yang tertuang pada SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 lampiran no 4 dan Direksi telah menyosialisasikan RJPP

No.	Aspek IV : DIREKSI
	yang sudah disyahkan kepada seluruh karyawan yang dihadiri oleh Kepala Divisi, Manajer sampai dengan pejabat eselon IV serta melibatkan serikat pekerja (karyawan), namun tidak secara eksplisit ditulis sosialisasi RJPP
15	PT KIE telah memiliki kebijakan TI sesuai Keputusan Direksi PT KIE nomor: 30/SKD/DIR/XII.2017 tentang kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi PT KIE tanggal 21 Desember 2017
16	PT KIE telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang tercantum pada SK Direksi PT KIE Nomor: 10/SKD/DIR/V-2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko tanggal 15 Mei 2017
17	Terdapat Piagam SPI PT KIE yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kepala SPI dan disetujui oleh Komisaris Utama pada tanggal 3 April 2017, yang berisikan kerangka pengendalian intern.
18	Terdapat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI PT KIE tahun 2018 telah dengan pendekatan risiko (risk based audit) yang di tandatangi pada 1 November 2017
19	PT KIE memiliki pendapat hukum (legal opinion) tentang permasalahan hukum yang terjadi di PT KIE. Legal opinion dibuat oleh Staf Legal PT KIE . Contoh legal opinion pada tahun 2018 terdapat pada tgl 23 November 2018
20	PT. KIE merupakan wajib pajak yang patuh sehingga tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen perpajakan dalam tahun 2017 dan juga tidak mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban pajak PPh, PPN, dan PBB.
21	PT. KIE mempunyai Kebijakan tanggung jawab Social dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV) PT KIE Nomor 28/SKD/DIR/XII-2017
22	PT. KIE melakukan perubahan Struktur organisasi dengan adanya jabatan baru yaitu Sekretaris Perusahaan sebagai <i>Liason Officer</i> dan sudah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Nomor : 05/KU/KIE/IX/2017.

No.	Aspek V : PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI
1	Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan yang tertuang dalam SK Direksi No: 25/SKD/DIR/XII-2017 tanggal 21 Desember 2017 memuat antara lain katagori informasi, jenis informasi, pihak yg bertanggung jawab, informasi kepada stakeholders harus melewati unit kerja Humas.
2	PT KIE sudah memiliki website perusahaan dan sudah mempublikasikan kebijakan dan informasi perusahaan antara lain: GCG, Kode Etik, program CSR, Profil Dekom dan Direksi, visi, misi,

No. Aspek V : PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI	
	rencana strategis, pengadaan, dan informasi penting lainnya dan bisa diakses dengan alamat <a href="https://kie.co.id">https://kie.co.id</a>
3	Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran website yang tertuang dalam SK Dewan Direksi PT KIE Nomor : 24/SKD/DIR/XII-2017
4	Perusahaan telah menyampaikan Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara berdampingan. Laporan tersebut masih belum dicetak dan masih perlu dilengkapi dan ditampilkan di website.

### III. 2. Rekomendasi

Berikut Rekomendasi secara umum terhadap Parameter yang ada

Aspek I : KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	
1	Direksi penanggung jawab GCG agar membuat rencana kerja .
2	Draft Pedoman Gratifikasi yang sudah dibuat agar segera di sahkan sebagai acuan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di PT KIE. Draft Pedoman yang sudah dibuat di sahkan dengan isi sekurang-kurangnya sesuai dengan prasyarat pada SK-16 dan dilakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung.
3	PT KIE perlu melakukan sosialisasi/diseminasi mengenai gratifikasi melalui pertemuan dan tatap muka atau media lain di Perusahaan. Untuk meningkatkan pemahaman pengendalian kebijakan gratifikasi.
4	PT KIE perlu menyusun kebijakan dan pedoman pelaporan pelanggaran ( <i>whistleblowing system</i> ) bagi stakeholder PT KIE secara khusus diluar Kode Etik Perusahaan PT KIE (saat ini sudah disusun dan baru berupa draft) dan perlu membuat laporan walaupun tidak ada yang melaporkan melalui aplikasi WBS yang sudah dimiliki perusahaan.

Aspek II : PEMEGANG SAHAM	
1	Pemegang Saham perlu menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi dan Dekom yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2	PS agar mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris, kemudian melaksanakan penilaian dan menetapkan calon Dekom terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian.
3	Pengesahan RJPP disahkan selambat-lambatnya 60 hari setelah diterima rancangan RJPP tau

## Aspek II : PEMEGANG SAHAM

	Revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau Revisi RJPP berjalan.
4	Sebaiknya Pemegang Saham mengesahkan RKAP selambat-lambatnya 31 Desember sebelum tahun berjalan, RKAP Perusahaan baru disahkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS pada TGL 22 Januari 2018, walaupun sudah sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyatakan maksimal pengesahan melalui RUPS RKAP adalah 1 bulan setelah akhir tahun.
5	Perlu disusun pedoman penunjukan audit eksternal. Dalam penunjukan Audit Eksternal, Dewan Komisaris belum memberikan usulan calon auditor eksternal sehingga belum dilakukan pembahasan oleh Pemegang Saham
6	PT KIE perlu meminta pemegang saham untuk menindaklanjuti rekomendasi asesmen GCG di tahun sebelumnya

## Aspek III : DEWAN KOMISARIS

1	Dekom agar membuat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dekom kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani
2	<p>Dewan Komisaris perlu membuat rencana kerja tahunan Dekom yang berisi program kerja yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun beserta anggarannya dan target-targetnya yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana dan Anggaran Pelatihan dan realisasinya</li> <li>proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi.</li> <li>Rencana Kerja Dekom mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya</li> <li>rencana Kerja Dekom mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan MR.</li> <li>rencana Kerja Dekom terkait pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.</li> <li>rencana Kerja Dekom terkait pengawasan dan pemberian nasihat mengenai SDM.</li> <li>rencana Kerja Dekom terkait pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.</li> <li>rencana Kerja Dekom mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya</li> <li>rencana Kerja Dekom mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.</li> <li>rencana Kerja Dekom mengenai kepatuhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga.</li> <li>rencana kerja Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan RKAP/RJPP</li> <li>rencana kerja Dewan Komisaris dengan salah satu pembahasannya membahas transaksi atau tindakan dalam lingkungan</li> <li>rencana kerja Dewan Komisaris dengan salah satu pembahasannya penunjukan auditor eksternal</li> <li>rencana kerja Dewan Komisaris dengan salah satu pembahasannya pengawasan auditor</li> </ol>

Aspek III : DEWAN KOMISARIS	
	eksternal o. Rencana kerja Dekom melaksanakan penelaahan pengusulan remunerasi Direksi
3	Belum Terdapat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholders dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.
4	Dewan Komisaris perlu berperan dalam pencalonan anggota Direksi PT KIE serta adanya kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut.
5	Dewan Komisaris sebaiknya membuat Kebijakan dan prosedur mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal
6	Seluruh Pemegang Saham belum menandatangani KPI Dekom yang telah disetujui
7	Dewan Komisaris sebaiknya membuat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian Kinerja Direksi dan melaporkan penilaian tersebut Kepada Pemegang Saham.
8	Dewan Komisaris sebaiknya memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
9	Melaksanakan rapat sesuai dengan direncanakan dalam RKA Dekom minimal sebulan sekali yang tertuang dalam Board Manual
10	Board Manual sudah ada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dekom namun perlu menambahkan poin b. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya; poin d. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
11	Dewan Komisaris perlu berperan dalam pencalonan anggota Direksi PT KIE serta adanya kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut. Belum terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian Kinerja Direksi dan Pelaporan Kepada Pemegang Saham.
12	Sebaiknya Komite Dewan Komisaris menyusun program kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris
13	Sebaiknya Komite Dekom menyusun risalah rapat pada setiap rapat termasuk telaahan didalamnya dan menyerahkannya kepada sek Dekom
14	Sebaiknya Komite Dekom agar menyusun Laporan Pengawasan Komite Dewan Komisaris kepada Dekom atas pelaksanaan tugas secara tertulis disertai dengan rekomendasi
15	Sebaiknya Komite Dekom membuat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

Aspek IV : DIREKSI	
1	Direksi agar membuat RKAT terkait pelatihan Direksi secara tersendiri, belum ada kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan dan setelah pelatihan Direksi membuat Laporan Pelaksanaan Pelatihan kepada unit SDM
2	KIE Perlu membuat kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan
3	PT KIE perlu memiliki/ mensyahkan kebijakan SPM yang saat ini masih dalam bentuk draft
4	PT KIE sebaiknya mempublikasikan pedoman/kebijakan pengadaan yang sudah dipunyai di website Perusahaan
5	PT KIE belum melaporkan tindak lanjut pemeriksaan dan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris dan menyelesaikan status tindak lanjutnya
6	PT KIE perlu menerapkan sistem tentang teknologi informasi dengan menetapkan pedoman pengembangan IT dan IT Masterplan dan setelahnya sebaiknya dilakukan audit TI. PT KIE agar memanfaatkan penerapan TI untuk penunjang kinerja Perusahaan. Agar dibuat laporan pelaksanaan Sistem Infomasi teknologi Kepada Dekom
7	Perusahaan perlu melaksanakan evaluasi efektivitas pengendalian intern
8	Kepala SPI telah kosong sejak th 2015, dari work load analysis dari internal ke SDM -> Kekurangan, namun belum ada penambahan karena perombakan struktur organisasi. Pernah dibahas oleh SDM. Terbukti dengan tidak tercapai
9	Direksi menandatangani pakta integritas dalam setiap Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan persetujuan
10	Direksi dalam Memberikan Informasi (laporan manajemen triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan) juga disampaikan kepada pemegang saham minoritas dengan muatan dan waktu yang sama seperti pemegang saham mayoritas dan Dewan Pengawas.
11	Direksi agar menyusun dan menyampaikan kepada Dekom mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi
12	Sebaiknya dilaksanakan evaluasi terkait program pengembangan SDM yang telah dilaksanakan dengan kriteria keberhasilannya
13	Risalah rapat Direksi mencantumkan evaluasi terhadap hasil rapat sebelumnya dan tindak lanjut dari rapat sebelumnya
14	Diharapkan Direksi dalam melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham).
15	Perlu adanya pembahasan dengan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan manajemen risiko.

Aspek IV : DIREKSI	
16	Direksi diharapkan melengkapi SOP yang diperlukan bagi perusahaan
17	Dalam setiap kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan agar diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut.
18	Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tentang analisis risiko atas Rancangan RKAP dan strategi penanganannya.
19	Perusahaan sudah memiliki kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya namun perlu dilengkapi terkait perlindungan hak dan kepentingan kreditur, Kebijakan pengelolaan pinjaman jangka panjang dan Kebijakan penjamin (avalist)
20	Direksi sebaiknya melakukan peninjauan dan pemutakhiran prosedur yang sudah tidak relevan
21	PT. KIE telah melakukan survey kepada karyawan dengan tingkat kepuasan 70%, namun Perusahaan belum melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan karyawan

Aspek V : PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI	
1	PT KIE telah membuat Laporan tahunan ( <i>Annual Report</i> ), namun masih perlu dilakukan perbaikan dengan melengkapi informasi sesuai dengan ketentuan kriteria yang ada dan di masukkan dalam website perusahaan.

## BAB V PENUTUP

1. Pelaksanaan Evaluasi *Assessment GCG* pada PT. Kaltim Industrial Estate dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.
2. Kegiatan evaluasi terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pelaksanaan evaluasi melalui :
  - a. Kegiatan evaluasi berupa verifikasi dokumen/lapangan terhadap semua parameter yang dilakukan di PT. Kaltim Industrial Estate.
  - b. Melakukan wawancara Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan staf Perusahaan PT. Kaltim Industrial Estate.
3. Dalam pelaksanaan evaluasi melalui verifikasi dokumen/lapangan terhadap parameter AoI, tim pelaksana melakukan pengumpulan data dan observasi terhadap bukti-bukti pendukung atas tindak lanjut perbaikan AoI yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Aoi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait (seperti Dewan Komisaris, Direksi Perusahaan, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Dekom dan staf perusahaan)
4. Dari hasil evaluasi *assessment GCG* dan hasil kuisisioner PT. Kaltim Industrial Estate, maka dilakukan penilaian/skoring terhadap pemenuhannya dengan total skor **76.068** dengan perincian sebagai berikut :
  - i. Aspek komitmen diperoleh skor **4.616** atau capaian **65.94%** dengan kategori Cukup Baik
  - ii. Aspek pemegang saham diperoleh skor **7.309** atau capaian **81.21%** dengan kategori Baik.
  - iii. Aspek Dewan Komisaris diperoleh skor **28.463** atau capaian **81.32%** dengan kategori Baik
  - iv. Aspek Direksi diperoleh skor **29.872** atau capaian **85.352%** dengan kategori Sangat Baik
  - v. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi diperoleh skor **5.809** atau capaian **64.54%** dengan kategori Cukup Baik
5. Dari hasil evaluasi *assessment GCG* dan hasil kuisisioner PT. Kaltim Industrial Estate terdapat penurunan jumlah AoI dari semula tahun 2017 sebanyak **223** (dua ratus dua puluh tiga) AoI dalam Faktor Uji Kesesuaian (FUK) menjadi **173** (seratus tujuh puluh tiga) AoI dalam FUK.



**PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE**  
**Ringkasan Hasil Penilaian/Evaluasi**  
**atas Penerapan *Good Corporate Governance***  
**TAHUN 2018**

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR/PARAMETER		BOBOT	CAPAIAN TAHUN 2017		PENJELASA N
			SKOR	% CAPAIA N	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7.000	4.616	65.94%	Cukup baik
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9.000	7.309	81.21%	Baik
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35.000	28.463	81.32%	Baik
IV	Direksi	35.000	29.872	85.35%	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9.000	5.809	64.54%	Cukup Baik
VI	Aspek Lainnya	0.000	0.000		
<b>SKOR KESELURUHAN</b>			<b>76.068</b>		<b>Baik</b>

Mengetahui:

Direktur Utama

Komisaris Utama

Illiana Arifiandi

Suldja Hartono

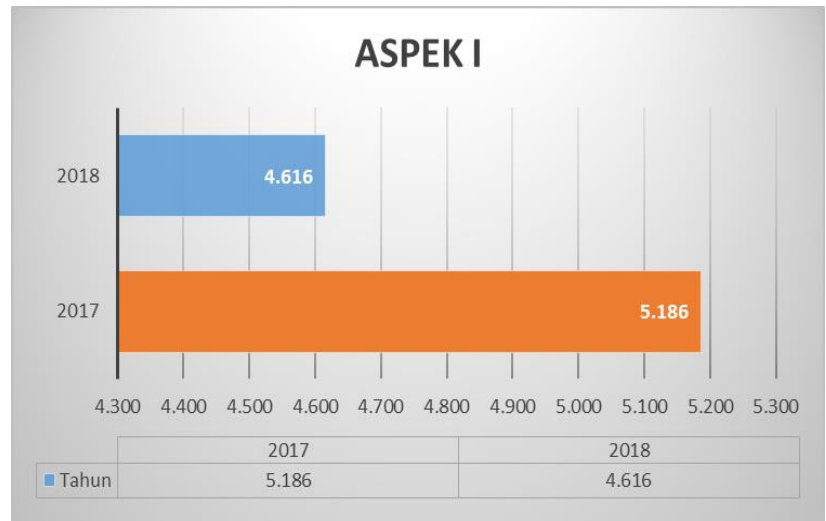


## Lampiran II : Perkembangan Kinerja GCG tahun 2017 dan tahun 2018

### II.1. Kinerja GCG per Aspek

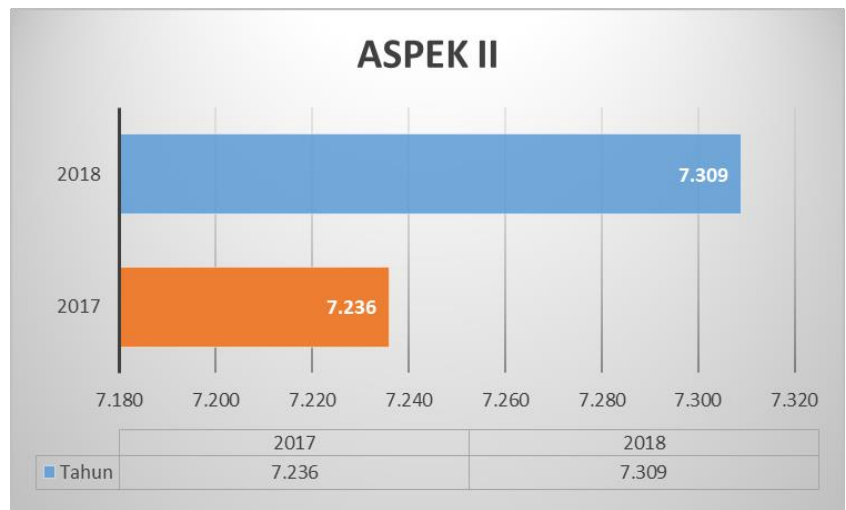
#### 1. Aspek Komitmen

Tahun	Skor
2017	<b>5.186</b>
2018	4.616



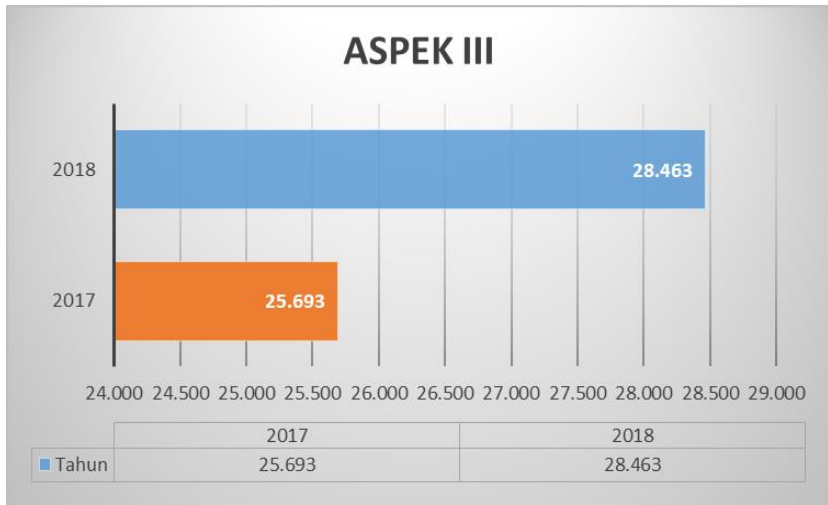
#### 2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

Tahun	Skor
2017	<b>7.236</b>
2018	<b>7.309</b>



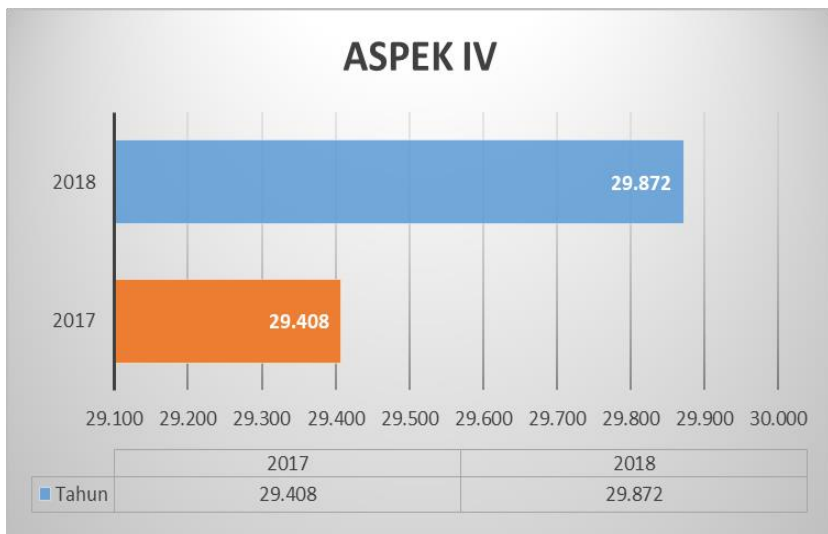
### 3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Tahun	Skor
2017	<b>25.693</b>
2018	28.463



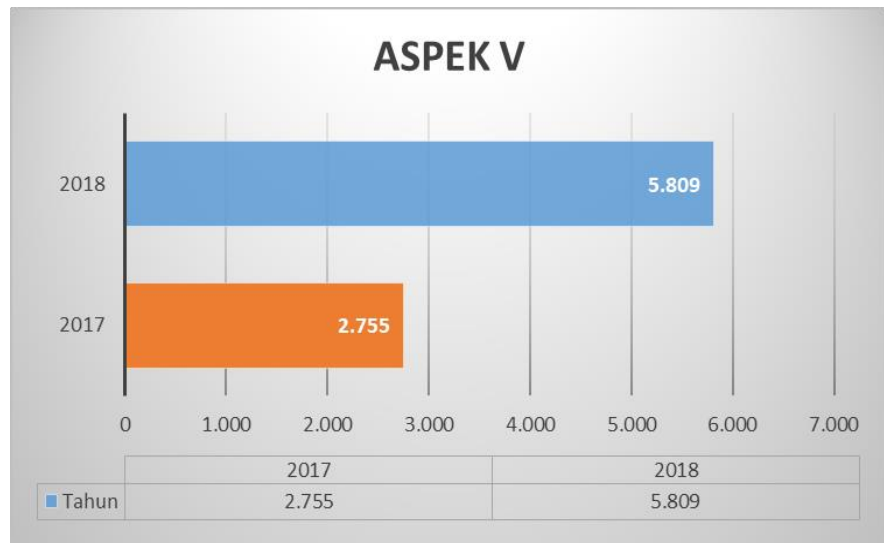
### 4. Aspek Direksi

Tahun	Skor
2017	<b>29.408</b>
<b>2018</b>	<b>29.872</b>

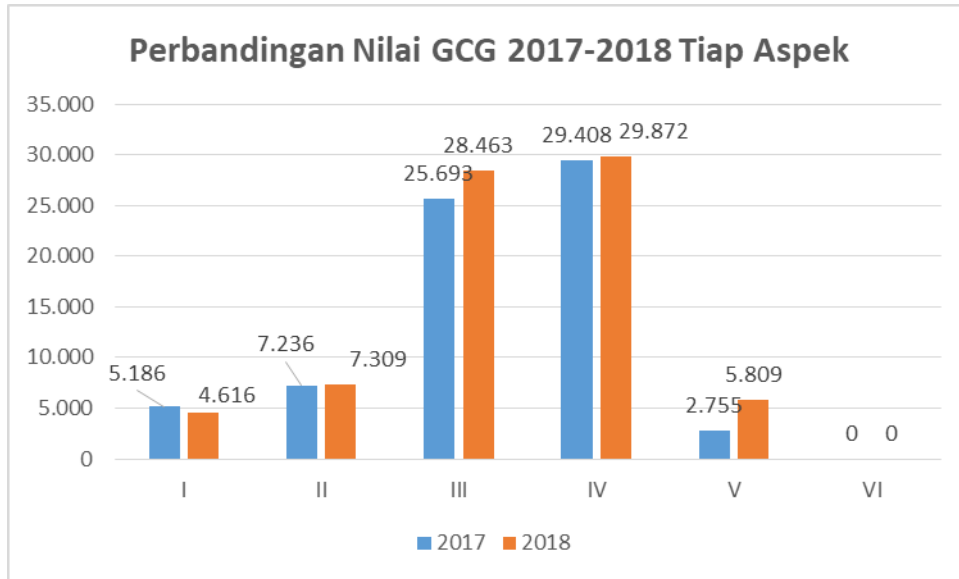


## 5. Aspek Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi

Tahun	Skor
2017	2.755
2018	5.809



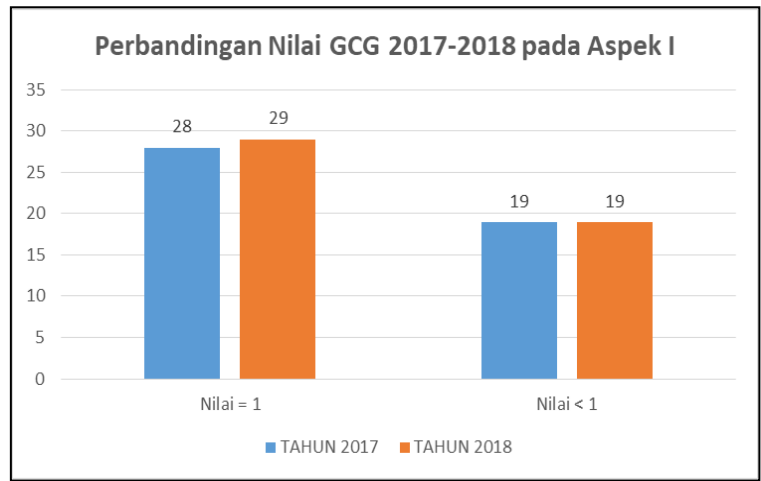
## II.2 Perbandingan nilai GCG 2017 dan 2018



## II. 3. Perkembangan AoI per Aspek

### I. Aspek komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik

SKOR	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Nilai = 1	28	29
Nilai < 1	19	19
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>48</b>



### II. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

SKOR	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Nilai = 1	52	51
Nilai < 1	16	17
<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>68</b>



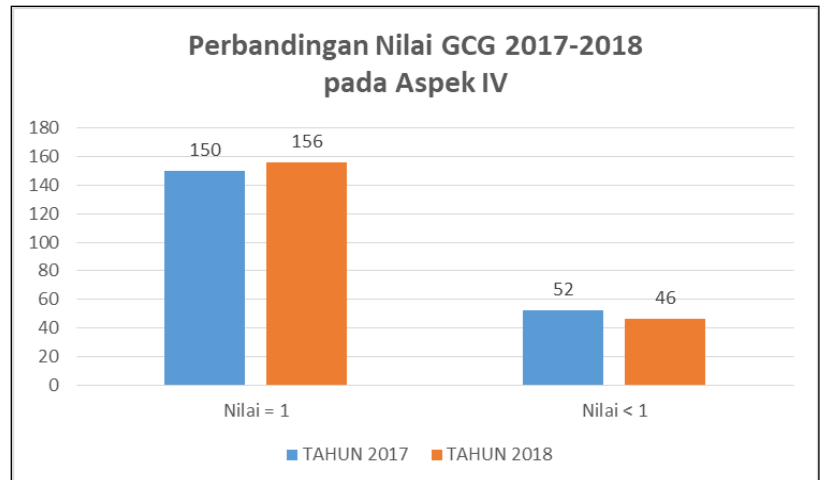
### III. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

SKOR	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Nilai = 1	106	118
Nilai < 1	61	49
<b>Jumlah</b>	<b>167</b>	<b>167</b>



### IV. Aspek Direksi

SKOR	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Nilai = 1	150	156
Nilai < 1	52	46
<b>Jumlah</b>	<b>202</b>	<b>202</b>



### V. Aspek Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi

SKOR	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Nilai = 1	13	46
Nilai < 1	63	30
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>76</b>





PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
1	1	1.000	Perusahaan telah memiliki Pedoman GCG sesuai dengan SK DIR No:01/SKD/DIR/I-2015.
	2	1.000	Pedoman GCG telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 21 Januari 2015
	3	1.000	Muatan Pedoman GCG telah mencakup ketentuan penerapan GCG sesuai PER-01/MBU/2011 (pasal 2 ayat 2) dan hal-hal lain mengikuti peraturan sektoral. Pedoman GCG yg dimiliki perusahaan antara lain Code GCG, Board Manual yg mengatur prinsip-prinsip hubungan antar Organ perusahaan, hubungan kerja Direksi & Dekom, mengatur tentang organ utama perusahaan yaitu Direksi, Komisaris, Komite Komisaris & Sekretaris Komisaris. Kebijakan lain yang telah ada antara lain Kebijakan IT, Kebijakan MR, Piagam SPI.
	4	1.000	Pedoman GCG PT KIE dimutakhirkan pada 21 Januari 2015
2	1	1.000	Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku (Code of conduct)
	2	1.000	Pedoman Perilaku telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 21 Januari 2015
	3	1.000	Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku (Code of conduct) yang isinya antara lain pedoman korporasi yang meliputi 16 perilaku dan 10 perilaku individu.
	4	1.000	Pedoman Perilaku PT KIE mulai berlaku 21 Januari 2015 masih berlaku 4 tahun.
3	1	1.000	Perusahaan telah memiliki Direktur penanggung jawab GCG yaitu Direktur Keuangan berdasarkan surat Direktur Utama No:04.02/DU/KIE-B/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017.
	2	0.750	Berdasarkan surat Direktur Utama No: 04.02/DU/KIE-B/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 sudah menunjuk Direktur keuangan sebagai penanggung jawab GCG dengan tugas: 1. Mengawasi dan memastikan kegiatan usaha Perusahaan dilakukan sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi berdasarkan prinsip kehati-hatian serta pedoman GCG. 2. Mengawasi dan memastikan bahwa pedoman GCG telah disosialisasikan kepada seluruh insan perusahaan. SK Direksi No: 29/SKD/DIR/XII-2017 telah menentukan Tim Pemantau Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dan Manajemen Risiko. Namun Direksi penanggung jawab GCG belum membuat rencana kerja yang diperlukan.

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	3	1.000	Perusahaan telah membuat laporan mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada pemegang saham melalui surat Dirut PT KIE Nomor: 01.01/DPB/KIE-B/I/2019
4	1	1.000	Perusahaan telah memiliki Board Manual (Includ Pedoman Direksi dan Dekom) tahun 2015 dan sudah disahkan oleh Direksi pada 21 Januari 2015. Pedoman GCG yg dimiliki perusahaan antara lain Code GCG, Board Manual yg mengatur prinsip-prinsip hubungan antar Organ perusahaan, hubungan kerja Direksi & Dekom, mengatur tentang organ utama perusahaan yaitu Direksi, Komisaris, Komite Komisaris & Sekretaris Komisaris. Kebijakan lain yang telah ada antara lain Kebijakan IT, Kebijakan MR, Piagam SPI, Code Of Conduct. Telah ada pelaksanaan komunikasi/sosialisasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung dan pejabat setingkat di bawah Direksi yang dapat dilakukan melalui ceramah/seminar/rapat, website.
	2	1.000	Perusahaan sudah memiliki kebijakan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai perkara yang terdapat dalam pedoman perilaku, antara lain : SK Direksi Nomor : 10/DIR/VIII-2016 tentang Tata Tertib, Disiplin Kerja dan Sanksi, Perusahaan juga sudah memiliki WBS yaitu pelaporan dugaan pelanggaran terhadap kode etik perusahaan pada alamat kie.co.id
	3	1.000	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT KIE sudah menandatangani Piagam Pakta Integritas/komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku;
	4	1.000	Seluruh karyawan telah menandatangani Piagam Pakta Integritas pernyataan kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan.
	5	0.500	Presepsi responden terkait pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris
	6	1.000	Pedoman Perilaku menjadi materi dalam proses induction (pengenalan) bagi karyawan baru dan dibagikan kepada seluruh karyawan PT KIE
	5	1	1.000
2		1.000	Dalam laporan tahunan sudah mencantumkan hasil asesmen GCG
6	1	1.000	Kontrak Manajemen PT KIE telah mencantumkan KPI mengenai pelaksanaan GCG dan ditandatangani oleh PS, Dekom dan Direksi
	2	1.000	PT KIE telah dua kali melaksanakan asesmen GCG dengan pencapaian pada 2016 sebesar 60,516 dan tahun 2017 sebesar 70,279

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
7	1	1.000	PT KIE tidak diwajibkan untuk melaksanakan penyampaian LHKPN oleh Pemegang Saham, tetapi karyawan Pupuk Kaltim yang ditugaskan di PT KIE dan menjabat Grade I dan II yang diwajibkan melaporkan LHKPN.
	2	1.000	Kebijakan Pelaporan LHKPN sesuai dengan SK Dir no: 60/DIR/XII.17 perihal pedoman Pelaporan
	3	1.000	Dalam SK tersebut sudah tercantum: 1. Jabatan yang wajib melaporkan 2. Pejabat Perusahaan yang berkoordinasi dengan KPK 3. Pemberian sanksi yang belum mengumpulkan LHKPN
	4	1.000	Dalam SK tersebut sudah mencantumkan sanksi terhadap pejabat yang tidak melaporkan LHKPN
8	1	1.000	Karena belum diwajibkan PT KIE belum melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN
	2	0.500	Pejabat Pupuk Kaltim yang berada di PT KIE dengan jabatan Grade 1 dan 2 telah melaporkan LHK pada alamat elhkp.co.id
9	1	1.000	Seluruh Pejabat wajib Lapo LHKPN (Karyawan Grade I & II Penugasan Pupuk Kaltim) telah menyampaikan Laporan LHKPNnya melalui elhkp.kpk.co.id
	2	1.000	Pejabat wajib lapo LHKPN secara berkala menyampaikan LHKPN kepada KPK RI dalam bentuk E-LHKPN
	3	1.000	Teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara PT KIE yang belum/tidak menyampaikan LHKPN dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim (NA)
10	1	0.250	Terdapat Draft Pedoman Pengendalian Gratifikasi tetapi Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan bahwa untuk saat ini pedoman Gratifikasi serta pedoman pelaporan pelanggaran ditunda pelaksanaannya dikarenakan kurangnya SDM.
	2	0.250	Terdapat Draft Pedoman Pengendalian Gratifikasi tetapi Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan bahwa untuk saat ini pedoman Gratifikasi serta pedoman pelaporan pelanggaran ditunda pelaksanaannya dikarenakan kurangnya SDM.
11	1	0.000	Belum terdapat Komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan di PT KIE
	2	0.000	Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan pada WBS KIE, namun pelaksanaannya masih pasif, karena tidak terdapat sosialisasi
	3	0.000	Persepsi responden terhadap tingkat pemahaman Dekom, Direksi dan karyawan terhadap pengendalian Gratifikasi.
	4	0.000	Belum terdapat kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada stakeholder perusahaan, karena kebijakan

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			belum termuat.
12	1	0.000	Belum terdapat kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, namun telah ada himbauan penolakan gratifikasi
	2	0.000	Belum terdapat pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan.
	3	0.500	Perangkat pendukung telah ada di tahun 2017 melalui aplikasi WBS PT KIE di website, namun belum terdapat kebijakan terkait gratifikasi dari tahun 2017
13	1	0.250	Kebijakan WBS masih dalam bentuk draft, menunggu persetujuan Dekom
	2	0.250	materi pedoman belum memenuhi semua ketentuan di pedoman. Perihal yang belum adalah Unit pengelola dan mekanisme penyampaian belum tercantum
14	1	0.000	Belum terdapat sosialisasi Kebijakan WBS karena kebijakan belum diresmikan Direksi
	2	0.000	Belum terdapat sosialisasi Kebijakan WBS karena kebijakan belum diresmikan Direksi
15	1	1.000	Perusahaan telah memiliki aplikasi WBS pada alamat <a href="https://lapor.kie.co.id">https://lapor.kie.co.id</a>
	2	0.000	Tidak terdapat laporan, karena belum dilaksanakan secara resmi
	3	0.000	Tidak terdapat laporan, karena belum dilaksanakan secara resmi
	4	0.000	Belum terdapat evaluasi dan pelaporan kebijakan WBS

## 2. Aspek Pemegang Saham/Pemilik Modal

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
16	1	1.000	PS sudah memiliki pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi seperti yang tertuang pada lampiran SK DIR No: 25/DIR/VII-2017
	2	1.000	Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi sesuai lampiran SK DIR No: 25/DIR/VII-2017 sudah memuat mekanisme penjangkaran dan prosedur fit and proper test calon Direksi
17	1	0.750	Calon Direksi PT KIE diusulkan oleh PS kemudian dilakukan asesmen oleh Tim Independen kemudian dilakukan wawancara oleh Direksi dan hasilnya dimintakan persetujuan kepada Dekom PKT dan PT Pupuk Indonesia (sumber data dari wawancara). Calon Direksi yang terpilih kemudian ditetapkan melalui RUPS LB.
	2	0.750	Calon Direksi PT KIE diusulkan oleh Pupuk Kaltim kemudian dilakukan UKK oleh tim independen yaitu PMK Jakarta setelah itu dimintakan persetujuan kepada Dekom PKT dan PT Pupuk Indonesia. Seluruh bakal calon Direksi dilakukan UKK oleh tim konsultan independen, penetapan Direksi dilakukan dalam RUPS LB.
	3	1.000	Dari hasil penjangkaran dan melalui fit and proper test yang dilakukan oleh Tim menghasilkan bakal calon Direksi (short list) dan disampaikan kepada Direksi PKT untuk kemudian minta persetujuan Dekom PKT
	4	1.000	Pelaksanaan UKK calon Direksi PT KIE dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Perusahaan. Calon Direksi diambilkan dari longlist yang ada di PSDM. Untuk Pak Illian Arifiandi UKK dilakukan oleh kementerian BUMN, kemudian diasesmen oleh Direksi PKT dan Direksi PI, kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris PKT untuk selanjutnya dilakukan penetapan oleh RUPS. Pelaksanaan UKK dilaksanakan sudah memasukkan semua kriteria penilaian Direksi (sumber data wawancara)
	5	1.000	Anggota direksi yang diangkat sudah tercantum dalam penetapan hasil UKK dan evaluasi oleh tim.
18	1	1.000	Berdasarkan akta risalah RUPS LB PT KIE pada 3 April 2017 terdapat pergantian Direktur Utama PT KIE dari Ir Bagus Subekti kepada Drs Illiana Arifiandi MM dan pada 1 Oktober 2018 sesuai akta risalah rapat Keputusan Sirkuler PS sebagai pengganti RUPS LB PT KIE tentang PLT Direktur Keuangan memberhentikan Sdr Sefin Martadjaja Sebagai Direktur Keuangan dan menunjuk sdr Muhammad Erriza Direktur Pengembangan Bisnis dan ditunjuk sebagai Pelaksana tugas Direktur Keuangan sejak 1 Oktober 2018
	2	1.000	Berdasarkan akta risalah RUPS LB PT KIE pada 3 April 2017 disebutkan pembedangan tugas direksi sebagai berikut : 1. Direktur Utama. 2. Direktur Keuangan. 3. Direktur Operasi .4. Direktur Pengembangan Bisnis.
	3	1.000	Berdasarkan akta risalah RUPS LB PT KIE pada 3 April 2017 komposisi Direksi sudah sesuai kebutuhan Perusahaan, seluruh Direksi memiliki latar belakang pengalaman di BUMN dan sesuai pembedangan tugas

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			Direksi yaitu : 1. Direktur Utama : Drs Illiana Arifiandi MM. 2. Direktur Keuangan : Sefin Martadjaja. 3. Direktur Operasi: Wahyuda Prakasa Jaya. 4. Direktur Pengembangan Bisnis : Muhammad Erriza. Pada 1 Oktober 2018 sesuai akta risalah rapat memberhentikan Direktur Keuangan Sefin Martadjaja dan menunjuk sdr Muhammad Erriza sebagai PLT Direktur Keuangan.
19	1	0.000	Pemegang Saham belum menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan.
	2	0.000	Pemegang Saham belum menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan.
20	1	1.000	Pada 3 April 2017 PT KIE melaksanakan RUPS LB yang memutuskan pergantian Direktur Utama dari Bagus Subekti kepada Illiana Arifiandi yang dihadiri seluruh pemegang saham dan melakukan keputusan sirkuler PS sebagai pengganti RUPS LB pemberhentian Sefin Martadjaja sebagai Direktur Keuangan dan menunjuk Muhammad Erriza sebagai PLT Direktur Keuangan yang dilaksanakan 1 Oktober 2018 yang ditandatangani seluruh pemegang saham
	2	1.000	Pada 2018 terjadi pemberhentian Direktur Keuangan Sefin Martadjaja yang ditugaskan menjadi SVP Niaga di PT Pupuk Indonesia berdasarkan akta risalah Keputusan diluar RUPS LB pada 1 Oktober 2018
	3	1.000	Pemberhentian Sefin Martadjaja sebagai Direktur Keuangan karena yang bersangkutan ditugaskan/dipromosikan menjadi SVP niaga di PT PI
21	1	1.000	Selama 2018 tidak terdapat pemberhentian sementara Direksi PT KIE oleh Dekom.NA
	2	1.000	NA
	3	1.000	NA
	4	1.000	NA
22	1	1.000	PS telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dekom yang sesuai dengan SK Direksi No:25/DIR/VII.17 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT Pupuk Kalimantan Timur (halaman 7). Materi pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dekom sudah memuat nominasi calon Dekom dan Fit & Proper test untuk calon Dekom
	2	1.000	PS telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dekom yang sesuai dengan SK Direksi No:25/DIR/VII.17 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT Pupuk Kalimantan Timur (halaman 7). Materi pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dekom sudah memuat nominasi calon Dekom dan Fit & Proper test untuk calon Dekom
23	1	0.000	Tidak ada usulan calon Dekom yang diusulkan oleh Pemegang Saham

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	2	0.000	Tidak ada usulan calon Dekom yang diusulkan oleh Pemegang Saham
	3	0.000	Tidak ada usulan calon Dekom yang diusulkan oleh Pemegang Saham
	4	0.000	Tidak ada usulan calon Dekom yang diusulkan oleh Pemegang Saham
24	1	1.000	<p>Sesuai akta risalah RUPS LB tanggal 03 April 2017 telah diberhentikan Pius Enos Ropa dan digantikan Suldja Hartono sebagai Dekom.</p> <p>Pengangkatan Dekom dilakukan berdasarkan RUPS LB jadi sudah sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>Pengangkatan Komisaris Utama KIE a.n. Suldja Hartono tertuang pada Akta Notaris nomor 2 tanggal 3 April 2017</p> <p>Pengangkatan anggota Dekom KIE a.n. Amarrullah Andi tertuang pada Akata Notaris tgl 8 Juni 2017.</p>
	2	1.000	Jumlah Dekom PT KIE sebanyak 3 orang dan Direksi PT KIE sebanyak 4 orang
25	1	1.000	Rangkap Jabatan Dewan Komisaris tercantum pada Anggaran Dasar PT KIE pasal 13 poin 32
	2	0.500	Tidak terdapat ketentuan dalam RUPS, tetapi telah tercantum pada anggaran dasar, bahwa rangkap jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan
26	1	1.000	Pada tahun 2018 tidak ada penetapan pemberhentian / perubahan Anggota Dewan Pengawas (NA)
	2	1.000	Dalam akta notaris di RUPS LB disebutkan alasan pemberhentian dikarenakan masa jabatan telah berakhir, bukan karena alasan lain yang merugikan perusahaan
27	1	1.000	Pedoman RJPP Anper ditetapkan melalui SK Dir No: 25/DIR/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017
	2	0.500	<p>Penyampaian RJP Revisi tahun 2016-2020 sesuai dengan Nomor: 14.01/DU/KIE-B/XI/2016 surat PT KIE tanggal 25 November 2016</p> <p>Terdapat pembahasan RJP PT KIE 2016-2020 tanggal 24 Mei 2016, sesuai pembahasan surat pada penyamaian RJP Revisi Nomor: 14.01/DU/KIE-B/XI.2016 tanggal 25 November 2016.</p> <p>Dekom memberikan tanggapan pada rapat bulanan yang tercantum pada bahan tayang rapat bulanan Direksi-Dekom.</p>
	3	1.000	Pemegang Saham mengesahkan RJPP PT KIE 2016-2020 pada tanggal 22 Januari 2018
	4	0.000	Pengasahan dilakukan 22 Januari 2018 untuk RJPP 2016-2020, Telat 2 tahun

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
28	1	1.000	Terdapat Prosedur penyusunan RKAP PT KIE 2017, Pedoman RKAP Anper terdapat di SK Dir No: 25/DIR/VII/2017 yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2017
	2	1.000	Terdapat pembahasan RKAP setiap tahunnya dengan Pemegang Saham.
	3	1.000	Pemegang saham memberikan pengesahan RKAP pada tanggal 22 Januari 2018
	4	0.000	Pemegang Saham mengesahkan rancangan RKAP Tgl 22 Januari 2018
29	1	1.000	Terdapat pembahasan antara Pemegang Saham dan Direksi PT KIE Pembelian saham PT KAD oleh PT KIE yang termasuk salah satu perihal yang perlu persetujuan RUPS di anggran Dasar
	2	1.000	Pemegang saham telah memberikan persetujuan tertulis perihal Pembelian saham PT KAD oleh PT KIE
	3	1.000	Persetujuan oleh Pemegang Saham dilaksanakan sudah tepat waktu pada tanggal 6 Juni 2018
30	1	1.000	Terdapat pedoman penilaian KPI Direksi PT KIE pada SK Dir No: 25/DIR/VII/2017 yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2017.
			Terdapat kontrak manajemen yang memuat target kinerja kolegal dan individu.  tidak terdapat kinerja kolegal dan individu berdasarkan hasil telaah Dewan Komisaris yang dilakukan pada rapat Direksi-Dekom.  Kinerja Direksi dituangkan dalam Risalah RUPS
	2	1.000	Terdapat pedoman penilaian KPI Dekom PT KIE pada SK DIR 25/DIR/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017.  Terdapat kontrak manajemen yang memuat target kinerja kolegal dan individu.  Penilaian kinerja Dekom berdasarkan penilaian kuantitatif dari laporan kinerja Dekom.  Kinerja Dekom dituangkan dalam Risalah RUPS
31	1	1.000	Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas Pengurus Perusahaan berdasarkan arahan dari Pemegang saham tahun 2017 berdasarkan SK DIR 25/DIR/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 petunjuk pelaksanaan Surat Keputusan Direksi PT KIE nomor:10.07/DIR/KIE/VI-2012 tentang honorarium dan tunjangan Pengurus Perusahaan.
	2	1.000	Penetapan tantiem dan insentif Dekom dan Direksi ditetapkan pada Keputusan Pemegang Saham PT KIE diluar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris
32	1	0.000	Tidak terdapat pedoman penunjukan audit eksternal oleh Pemegang Saham



PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	2	0.000	Dewan Komisaris belum memberikan usulan calon auditor eksternal sehingga belum dilakukan pembahasan oleh Pemegang Saham
	3	1.000	Dalam RUPS RKAP 2018, PS meminta Dekom Perseroan agar berkoordinasi PT Pupuk Kaltim dalam hal pelaksanaan seleksi KAP yang akan melakukan laporan keuangan untuk tahun buku 2018. Selanjutnya Dekom melaporkan hasil seleksi dimaksud kepada RUPS agar mendapatkan penetapan secara definitif dengan memperhatikan GCG dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
33	1	1.000	Pedoman laporan tahunan diatur dalam pedoman tata kelola Anper pasal 6 poin C tentang pelaporan pelaksanaan RKAP dan format Laporan pelaksanaan RKAP
	2	1.000	Terdapat telaahan terhadap laporan tahunan (termasuk laporan keuangan) dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal yang tertang dalam notulen RUPS Persetujuan laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017
	3	1.000	Terdapat pemberian persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan yang dituangkan dalam risalah RUPS tanggal 16 Mei 2018
	4	1.000	Terdapat keputusan sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti RUPS LB PT KIE tentang pelaksana tugas Direktur Keuangan
34	1	0.000	Kebijakan dividen ditetapkan pada saat pembahasan RUPS kinerja tahunan
	2	1.000	Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden telah mempertimbangkan pengembangan usaha/investasi perusahaan tanggal 16 Mei 2018 dalam RUPS Kinerja
	3	1.000	Penetapan penggunaan laba bersih untuk deviden tidak melanggar ketentuan perjanjian pinjaman atau ketentuan penerbitan obligasi tanggal 16 Mei 2018 dalam RUPS Kinerja
35	1	1.000	Pengesahan laporan tahunan telah dilaksanakan tepat waktu paling lambat bulan Juni tanggal tanggal 16 Mei 2018 dalam RUPS Kinerja
36	1	1.000	Pimpinan Rapat (RUPS) dipilih sesuai ketentuan perundang-undangan (PKT sebagai PS mayoritas menjadi penyumbang suara terebsar) dan peserta rapat RUPS telah mencapai kuorum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
	2	1.000	Peserta rapat memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan
37	1	1.000	PS diberikan kesempatan ada skenario, di risalah ada sesuai risalah rapat 16 Mei 2018
	2	1.000	Pada pengambilan keputusan /RUPS seluruh PS baik Pemegang Saham Mayoritas maupun Minoritas hadir

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	3	1.000	Pemegang Saham Mayoritas maupun Minoritas hadir dalam pengambilan keputusan
38	1	1.000	Terdapat arahan Pemegang Saham tentang persetujuan transaksional
	2	1.000	Terdapat pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan GCG di PT KIE yaitu meningkatkan skor GCG 2018
	3	0.000	PS belum menindaklanjuti AOI GCG 2017
39		1.000	Tidak terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari Pemegang Saham yang bersifat transaksional/operasional yang tidak berdasarkan usulan dari Direksi
40	1	1.000	Terdapat dalam laporan manajemen rutin
	2	1.000	ada respon dari PS, surat tanggapan atas penurunan kinerja. Sesuai dengan surat Pemegang Saham no 756/D10000-JKT/VIII.18 tanggal 31 Agustus 2018

### 3. Aspek Dewan Komisaris

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
41	1	1.000	Dekom sudah menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi Dekom yang baru berdasarkan surat Sekdekom No :04/DEKOM/KIE/VIII/2017.
	2	1.000	Anggota Dekom yang baru mengikuti program pengenalan yang diadakan oleh Perusahaan pada 27 Agustus 2017 di Hotel Equator dengan menyampaikan dokumen berupa : anggaran dasar PT KIE, laporan kinerja, laporan manajemen tahunan, buku pedoman GCG, board manual, pedoman kode etik.
	3	1.000	Seluruh anggota Dekom yang baru hadir dalam program pengenalan yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2017 .
42	1	1.000	Perusahaan telah memiliki kebijakan pelatihan Dekom yang dituangkan didalam Board Manual PT KIE halaman 8.
	2	0.000	Telah terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris dan OPD sebesar Rp. 60.000.000 dan sudah dimasukkan dalam RKAP 2018
	3	0.000	Selama 2018 seluruh Dekom telah mengikuti program pelatihan Eksplorasi Hukum Korporasi dan GCG dalam hubungan induk anak perusahaan
43	1	1.000	Sesuai surat keputusan Dekom No: KEP-01/DEKOM/KIE/VII/2017 Tentang Pembagian Tugas Dekom sudah mencakup bidang tugas Direksi, 1. Suldja Hartono bidang keuangan dan korporasi, 2. Agus Subekti bidang SDM, Umum dan Operasi, serta menjabat ketua Komite Audit, 3. Amrullah sebagai komite GCG
	2	1.000	Dewan Komisaris telah menetapkan pembagian tugas Dekom sesuai surat keputusan Dekom No: KEP-01/DEKOM/KIE/VII/2017 Tentang Pembagian Tugas Dekom PT KIE.
	3	1.000	01/DEKOM/KIE/VII/2017 Tentang Pembagian Tugas Dekom sudah mencakup bidang tugas Direksi, 1. Suldja Hartono bidang keuangan dan korporasi, 2. Agus Subekti bidang SDM, Umum dan Operasi, serta menjabat ketua Komite Audit, 3. Amrullah Andi Mappurwa bidang Pengembangan dan pemasaran, ketua Komite GCG, PMRI
	4	1.000	Dewan Komisaris telah menunjuk anggota Dekom sebagai ketua Komite Dekom sesuai SK Dekom No: KEP-01/DEKOM/KIE/VII/2017 yaitu 1. Agus Subekti sebagai Ketua Komite Audit. 2. Amrullah Andi Mapparawa sebagai Ketua Komite GCG, PMR dan Investasi.
44	1	1.000	Dekom sudah memiliki Kebijakan Pengambilan Keputusan sesuai dengan SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dekom PT KIE poin 4 halaman 3
	2	1.000	Dekom sudah memiliki standart waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi yaitu 7-14 hari yang tertuang dalam lampiran SK Dekom No: KEP-

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			02/DEKOM/KIE/III/2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dekom PT KIE no 4(c) halaman 3.
	3	0.500	Sebelum rapat gabungan Dekom dan Direksi, Dekom melakukan rapat internal untuk memutuskan atau memberi arahan sehingga mekanisme yang dipakai dalam mengkomunikasikan keputusan Dekom adalah saat rapat gabungan Dekom dan Direksi. Rapat Dekom dan Direksi selalu dilaksanakan setelah rapat internal Dekom namun secara existing ketentuan tingkat kesegeraan belum ada.(wawancara)
45	1	1.000	Dekom sudah memiliki kebijakan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang tertuang pada SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 no 5 halaman 4.
	2	1.000	Dekom telah menyusun RKAT Dekom 2018 dan sudah ditandatangani oleh seluruh Dekom pada 21 Desember 2017.
	3	1.000	Telah ada RKAT Dekom yang memuat rencana kerja dan anggaran yang disahkan oleh seluruh Dekom
	4	1.000	Dekom telah menyampaikan RKAT Dekom untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP sesuai surat Komut Nomor : 18/DEKOM/KIE/XII/2017 pada 22 desember 2017
	5	1.000	Rencana kerja dan anggaran tahunan Dekom telah disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan sesuai surat Dekomn
46	1	1.000	Dekom sudah memiliki kebijakan tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi yang tertuang dalam lampiran SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 no 6 halaman 5.
	2	1.000	Dekom sudah memiliki kebijakan tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi baik yang bersifat rutin-berkala maupun insidental yang tertuang dalam lampiran SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 no 6 (a,b,c,d) halaman 5.
	3	1.000	Perusahaan sudah menyediakan bahan bacaan berupa laporan-laporan keuangan, laporan manajemen, laporan kinerja perusahaan dll. Upaya mendapatkan informasi juga dilakukan dengan mengadakan rapat antara Dekom dan Direksi.
47	1	1.000	Dekom sudah memiliki kebijakan mengenai mekanisme pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dekom terhadap RJPP yang tertuang dalam lampiran SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 halaman 7 no 7.
	2	0.500	Dekom belum memiliki rencana kerja Dekom yang berkaitan dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi namun dalam RKA Dekom sudah disampaikan pengawasan dan pelaksanaan RJPP.
	3	0.750	Dekom telah melakukan telaah bersama seluruh perangkat Dekom terhadap RJPP KIE dan memberikan arahan sesuai surat Dekom No: 2.01/KU/KIE-J/VII/2017. RJP dibahas dalam rapat antara Dekom dan Direksi pada 19 Oktober 2017.

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	4	0.500	Dekom telah melakukan telaah bersama seluruh perangkat Dekom terhadap RJPP KIE dan memberikan arahan sesuai surat Dekom No: 2.01/KU/KIE-J/VII/2017. RJP dibahas dalam rapat antara Dekom dan Direksi pada 19 Oktober 2017
	5	0.500	Berdasarkan persepsi responden
48	1	1.000	Dekom telah memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dekom terhadap rancangan RKAP yang tertuang dalam lampiran SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 halaman 7 no 8.
	2	1.000	Telah ada RKAT Dekom terkait dengan pembahasan RKAP sesuai rencana kegiatan Dekom poin b nomor 5
	3	1.000	Rancangan RKAP PT KIE 2018 telah dibahas dalam rapat antara Dekom dan Direksi pada 27 September 2017
	4	0.500	Dekom memberikan tanggapan tertulis mengenai rancangan RKAP dan selalu dibacakan dalam RUPS
	5	0.500	Berdasarkan persepsi responden
49	1	1.000	Dekom sudah memiliki kebijakan mengenai Pemantauan Perubahan Lingkungan Bisnis yang berdampak pada usaha perusahaan yang tertuang dalam lampiran SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 halaman 8 no 9.
	2	1.000	Direksi telah menyediakan bahan bacaan/referensi yang memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan. Bahan/referensi yang disediakan oleh Direksi antara lain berupa laporan manajemen dan laporan evaluasi kinerja (bulanan) dan analisis terkait perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya melalui rapat yang diadakan oleh Komite-Komite Komisaris. Perusahaan juga menyediakan bahan bacaan berupa media cetak nasional.
	3	1.000	Dekom selalu melakukan telaah atas isu-isu terkini diantaranya proyek Bintuni, proyek PLTU Tanjung Selopr, kerjasama dengan Rekayasa di Bojonegoro dan Balikpapan yang dilakukan dalam rapat internal Dekom
	4	1.000	Pada 2018 isu perubahan lingkungan bisnis selalu direspon oleh Dekom dan dilakukan telaahan dan masih sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan.
	5	1.000	Dekom selalu merespon permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan (kebijakan pelayanan harus ada standar pelayanan)
50	1	1.000	Dekom sudah memiliki kebijakan dalam merespon saran, permasalahan, atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			kepada Direksi yang tertuang dalam lampiran SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 29 Maret 2017 halaman 9 no 10.
	2	1.000	Dalam praktiknya saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders telah dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris, pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian disampaikan kepada Direksi dalam rapat gabungan Dekom dan Direksi. Keluhan dan saran selalu ditindaklanjuti.
	3	1.000	Penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan kepada Direksi dilaksanakan pada saat rapat gabungan Dekom dan Direksi.
	4	1.000	Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholder yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.
	5	1.000	Dalam tahun 2018 tidak terdapat permasalahan hubungan dengan stakeholder yang berdampak pada kinerja perusahaan, yang tidak dibahas dalam rapat Dewan Komisaris
51	1	1.000	Dekom sudah memiliki kebijakan atas rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yang tertuang dalam lampiran SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 pada 29 Maret 2017 halaman 9 no 11.
	2	1.000	Dewan Komisaris telah memiliki rencana mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yang tertera dalam RKAT Dekom yaitu Rencana Kegiatan Dekom poin d.
	3	1.000	Arahan terkait Sistem Pengendalian Intern disampaikan pada rapat gabungan antara Dekom dan Direksi sesuai risalah rapat pada 22 Maret 2018 diantaranya kedepan agar disampaikan SPI Perusahaan secara keseluruhan, dan menyampaikan pelaksanaan SPIP melalui SPI, Manajemen Risiko maupun GCG. Dekom juga meminta gambaran sejauh mana internal kontrol atas 5 pilar bisnis
	4	1.000	Penyampaian arahan terkait sistem pengendalian intern disampaikan pada saat rapat gabungan Dekom dan Direksi sesuai risalah rapat pada 22 Maret 2018.
	5	0.500	Berdasarkan persepsi responden
52	1	1.000	Dekom sudah memiliki kebijakan atas rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya yang tertuang dalam lampiran SK Dekom No: KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 halaman 10 no 12.
	2	1.000	Dekom telah memiliki rencana kerja Dekom terkait penelaahan dan evaluasi penerapan MR di perusahaan sesuai Rencana Kerja Dekom Bidang Pengawasan Poin 1 c.
	3	1.000	Dekom telah memberikan arahan atas kebijakan Manajemen Risiko sesuai risalah rapat 24 April 2018. Isi arahan antara lain agar dilakukan

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			penunjukan Key Person untuk masing-masing Unit Kerja , penyusunan kajian risiko agar membentuk mindset bahwa kajian risiko suatu keharusan dan kebutuhan
	4	1.000	Dekom telah menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan dalam rapat gabungan Dekom dan Direksi pada 24 April 2018.
	5	0.500	Berdasarkan persepsi responden
53	1	1.000	PT KIE telah memiliki kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya yang tertuang pada Keputusan Dekom nomor:KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang kebijakan tata kelola yang baik Dekom PT KIE pada poin 13
	2	1.00	Dekom telah memiliki rencana kerja Dekom terkait penelaahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknologi informasi perusahaan sesuai Rencana Kerja Dekom Bidang Pengawasan Poin 3 b.
	3	0.000	Dekom belum melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
	4	0.000	Dekom belum memberikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem TI
	5	0.500	Berdasarkan persepsi responden
54	1	1.000	PT KIE telah memiliki kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang tertuang pada Keputusan Dekom nomor:KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang kebijakan tata kelola yang baik Dekom PT KIE pada poin 14
	2	1.000	Dekom telah memiliki rencana kerja Dekom terkait penelaahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SDM perusahaan sesuai Rencana Kerja Dekom Bidang Pengawasan Poin 3 b.
	3	0.500	Dekom telah memberikan arahan terkait SDM yaitu peningkatan kompetensi karyawan PT KIE dalam rapat gabungan Dekom dan Direksi sesuai risalah rapat tanggal 11 juli 2018, namun sebatas peningkatan kompetensi karyawan PT KIE
	4	0.500	Dekom menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya dalam rapat gabungan anggaran Dekom dan Direksi . (wawancara)
	5	0.500	Berdasarkan persepsi responden
55	1	1.000	Ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP- tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dewan Komisaris PT KIE yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2017, dan telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	2	1.000	Terdapat rencana Kerja Dewan Komisaris pada RKA Dekom 2018 tentang Pengawasan di Bidang Keuangan
	3	1.000	pembahasan kebijakan Akuntansi tertuang pada risalah Rapat Dekom-Direksi PT KIE pada tanggal 20 Agustus 2018,
	4	1.000	Arahan Dewan Komisaris tersebut tertuang pada Risalah Rapat Dekom
	5	0.500	Persepsi responden terhadap kualitas saran Dewan Komisaris atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya (kuesioner).
56	1	1.000	Ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP- tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dewan Komisaris PT KIE yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2017, dan telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.
	2	0.000	Pada RKA DEkom 2018 telah terlihat rencana Dekom mengenai penelaahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja marketing dan pengadaan
	3	1.000	Dekom telah mekaukan pembahasan terkait kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya tertuang didalam Risalah Rapat Dekom-Direksi tanggal 14 November 2018
	4	1.000	Arahan terkait kebijakan pengadaan telah tertuang Risalah Rapat Dekom-Direksi pada 14 November 2018
	5	0.500	Persepsi responden terhadap kualitas atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya (kuesioner).
57	1	1.000	Ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP- tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dewan Komisaris PT KIE yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2017, dan telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.
	2	0.000	Pada RKA Dekom 2018 belum terlihat rencana Dekom mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.
	3	1.000	Pembahasan terhadap kebijakan mutu tertuang pada Risalah Rapat Dekom-Direksi PT KIE pada tanggal 23 Oktober 2018
	4	1.000	Tanggapan dan Arahan Dekom terkait kebijakan Mutu tertuang dalam risalah Rapat Dekom Direksi bulan Oktober 2018
	5	0.500	Persepsi responden terhadap kualitas atas saran Dewan Komisaris mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya (kuesioner).
58	1	1.000	Ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP- tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dewan Komisaris PT KIE yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2017, dan telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.



PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	2	1.000	Pada RKA Dekom 2018 tertuang Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
	3	0.000	Belum terlihat notulen Dewan Komisaris membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
	4	0.000	Belum terlihat arahan Dekom kepada Direksi terkait kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
	5	0.000	Belum terlihat laporan Dekom kepada terkait kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
	6	0.500	Tingkat kualitas atas evaluasi Dewan Komisaris atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP.
	7	0.000	Belum terlihat arahan Dekom kepada Direksi terkait kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
	8	0.500	Kualitas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian dengan pihak ketiga.
	9	1.000	Tidak pernah terjadi pelanggaran/ kasus hukum oleh Direksi pelanggaran
	10	1.000	Tidak pernah terjadi permasalahan mengenai pelanggaran
59	1	1.000	Ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP- tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dewan Komisaris PT KIE yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2017 dan telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris. (pada poin 19)
	2	1.000	Pada RKA Dekom 2018 Terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP.
	3	1.000	Evaluasi terkait pencapaian Perusahaan terkait RKAP di bahas khusus dalam Risalah Rapat Dekom Direksi pada tanggal 27 September 2017
	4	0.500	Laporan Manajemen tidak ditandatangani oleh Dewan Komisaris laporan tersebut hanya di CC kepada Dekom
60	1	1.000	Ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP- tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dewan Komisaris PT KIE yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2017 dan telah ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris. (Pada poin 20)
	2	1.000	Pada RKA Dekom 2018 Terdapat rencana Dewan Komisaris melakukan pembahasan transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	3	1.000	Terdapat pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.
	4	1.000	Pemberian otoritas diberikan kurang dari 14 hari karena langsung dibahas pada Risalah rapat Dekom
61	1	0.000	Belum terdapat kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal, pada Anggaran Dasar terdapat kewajiban mengusulkan akuntan publik kepada rapat umum pepegang saham
	2	0.000	Tidak terdapat rencana kerja Dewan Komisaris terkait calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT
	3	1.000	Penunjukan auditor eksternal dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Pemegang Saham telah memberikan mandat untuk pelaksanaan penunjukan auditor eksternal oleh Dewan Komisaris PT KIE. Komite Audit PT KIE telah melakukan koordinasi dengan PT Pupuk Kaltim selaku PS mengenai auditor eksternal, arahan dari PS adalah in line dengan PT Pupuk Indonesia (Persero)
	4	1.000	Terdapat surat penunjukkan dari PI beserta honorariumnya
	5	0.000	Belum terlihat evaluasi Kinerja Auditor Eksternal oleh Dewan Komisaris
62	1	1.000	PT KIE telah memiliki kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik Modal tersebut yang tertuang pada Keputusan Dekom nomor:KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 tentang kebijakan tata kelola yang baik Dekom PT KIE pada poin 21
	2	1.000	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal
	3	1.000	Terdapat tindak lanjut Arahan dan Manajemen Latter terkait penilaian penilaian evektifitas hasil audit eksternal
	4	1.000	Terdapat arahan Dekom terkait Sistem Pengendalian Interm yang tertuang dalam Risalah Rapat Dekom Direksi
63	1	1.000	Telah terdapat kebijakan mengenai terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi pada Keputusan Dewn Komisaris PT KIE nomor:KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 tentang kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dekom PT KIE
	2	1.000	Dewan Komisaris melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan setiap bulannya pada rapat Dekom-Direksi tiap bulannya

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	3	1.000	Dewan Komisaris melaporkan pada Pemegang Saham tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta memberikan saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Direksi
	4	0.500	Persepsi responden terhadap kualitas atas arahan langkah-langkah perbaikan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi (kuesioner).
64	1	1.000	Kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan tertuang pada pada Keputusan Dewan Komisaris PT KIE nomor:KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 tentang kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dekom PT KIE
	2	1.000	Pada Rencana Kerja & Anggaran Dekom 2018 poin e. kegiatan lainnya terdapat rencana peninjauan lapangan dan monitoring kegiatan operasi Perusahaan, anak Perusahaan/investasi/proyek yang sedang berjalan
	3	1.000	Terdapat pembahasan kinerja anak Perusahaan pada risalah rapat Dewan Komisaris Direksi November 2018.
	4	0.500	Persepsi responden terhadap kualitas yang memadai atas hasil evaluasi terhadap Kebijakan dan pengelolaan anak Perusahaan (kuesioner).
65	1	1.000	Telah terdapat kebijakan atas pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/ Perusahaan Patunganyang tertuang pada Kep Dekom Nomor KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017
	2	1.000	Dewan Komisaris menyampaikan bahwa menyetujui usulan pergantian Direktur Operasi dan Komersil berdasarkan surat 01.01/KU/KIE-J/V/2017 pada tanggal 5 Mei 2017 (2018 tidak ada)
	3	1.000	Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak Perusahaan sebelum 15 hari kalender sejak tanggal diterimanya salon Direksi dan Dekom anak Perusahaan
66	1	1.000	Belum adanya kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.
	2	1.000	Dewan Komisaris tidak berperan dalam proses pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dikarenakan pemilihan Direksi dan Dekom PT KIE dipilih oleh Pemegang Saham
	3	1.000	Belum ada usulan Komisaris dan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS/Pemilik modal
67	1	0.000	Belum terdapat kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian Kinerja Direksi dan Pelaporan Kepada Pemegang Saham.
	2	0.000	Belum terdapat rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pamantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. Dewan Komisaris melakukan Penilaian kinerja Direksi melalui Metode Kualitatif pembahasan Dewan Komisaris.

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	3	0.750	Terdapat penilaian kinerja Direksi berdasarkan target Operasional dan Finansial yang tertuang dalam KPI kolegal dengan realisasi pencapaiannya tertuang dalam Laporan Tugas Pengawasan Dekom PT KIE
	4	1.000	Laporan Tugas Pengawasan Dekom PT KIE Dilaporkan kepada Pemegang Saham setiap triwulan
68	1	1.000	Kebijakan terkait Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengusulan remunerasi Direksi tertuang pada Keputusan Para Pemegang Saham PT KIE di lur Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Penyesuaian Remunerasi Pengurus PT KIE pada tanggal 25 November 2016
	2	0.000	Belum terdapat rencana Dekom dalam RKA Dekom terkait pengusulan Remunerasi Direksi
	3	1.000	Terdapat Surat Dekom terkait telaahan dekom namun belum terlihat dasar pertimbangan penilaian Kinerja Direksi
	4	1.000	Terdapat Usulan Dekom terkait Remunerasi Direksi terkait Direksi,
69	1	1.000	Kebijakan terkait Benturan Kepentingan Dewan Komisaris tertuang pada Kep Dekom Nomor KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017
	2	1.000	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal.
	3	1.000	Dekom melaporkan Daftar Khusus mengenai kepemilikan saham Dekom dan/atau keluarga pada perusahaannya pada 10 Januari 2018
70	1	1.000	Terdapat kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang tertuang dalam Kep Dekom Nomor KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017
	2	1.000	Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tertuang dalam Laporan Tugas Pengawasan Dekom
	3	1.000	Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sesuai dengan risalah rapat Dekom-Direksi PT KIE tanggal 23 Mei 2018
	4	1.000	Dewan Komisaris menindaklanjuti area of improvement hasil assessment/review GCG pada rapat Direksi-Dekom
71	1	1.000	Kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Kep Dekom Nomor KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017
	2	0.750	KPI Dekom KIE tahun 2018 sesuai surat 03/DEKOM/KIE/I/2018 yang di tandatangani oleh seluruh Dekom, namun Pemegang Saham Mayoritas belum menandatangani KPI tersebut

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	3	0.000	Belum terdapat penilaian pencapaian kinerja masing-masing anggota Dekom ataupun Komite Dekom. Penilaian Dekom bersifat kolegial bukan masing-masing
	4	1.000	Penilaian kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
72	1	1.000	Pedoman Tata tertib rapat Dewan Komisaris tertuang pada Kep Dekom Nomor KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 pada poin 28.3. Selain itu terdapat pula pada Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi "Board Manual" didalam Pedoman tersebut mengatur Etika Rapat, Risalah Rapat.
73	1	0.500	Rencana Agenda rapat antara Dekom-Direksi tiap bulan dibahas pada rapat Komite Audit dan Manajemen KIE tanggal 15 Maret 2018, namun rencana rapat dekom belum dituangkan dalam risalah tertulis
	2	0.500	Pelaksanaan Rapat Dekom-Direksi selama 2018 sebanyak 11 kali yang harusnya 12x
	3	1.000	Persentase Anggota Dekom menghadiri rapat internal: Suldja 100%, Ammarullah 100%, Agus S 90%
	4	1.000	Ada surat kuasa dari Agus Subekti kepada Andi Amrullah sesuai nomor 27/DEKOM/KIE/X/2018 pada tanggal 23 Oktober 2018
74	1	0.500	Terdapat evaluasi Dekom atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, namun tidak semua risalah rapat mencantumkan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya di agenda dalam risalah rapat
	2	0.500	Terdapat evaluasi Dekom atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, namun tidak semua risalah rapat mencantumkan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya di agenda dalam risalah rapat
75	1	1.000	Tugas pokok dan fungsi Sekdekom terdapat pada Kep Dekom Nomor KEP-02/DEKOM/KIE/III/2017 pada poin 28.1
	2	1.000	Tugas pokok dan fungsi Sekdekom telah mencakup kriteria pada penilaian yang ada
76	1	1.000	telah ada fasilitas penyimpanan dokumen disediakan di kantor Perwakilan Jakarta
	2	1.000	telah terdapat daftar surat keluar masuk
77	1	1.000	Telah terdapat undangan rapat Dekom yang disampaikan kepada seluruh anggota Dekom
	2	0.500	Sekdekom memberikan bahan rapat internal Dekom dari OPD ke dekom sebelum pelaksanaan Rapat Internal Dekom
	3	1.000	Telah terdapat dokumentasi hasil rapat Dekom secara memadai
78	1	1.000	Tindak lanjut arahan Dewan Komisaris dilakukan secara online melalui <a href="http://simonera.kie.co.id/">http://simonera.kie.co.id/</a>
	2	1.000	Sekdekom mempersiapkan bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan.

PR M	FU K	SKO R FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	3	1.000	Sekdekom mempersiapkan data/informasi yang berkaitan dengan dukungan administrasi dan monitoring yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris
79	1	1.000	Telah terdapat komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
	2	1.000	Terdapat komite lain, yaitu Komite GCG, PMRI dengan ketua Bpk. Amarullah dan anggota Bpk. Turkhamim, Heru Herjanto, Dormatua Siahaan
	3	1.000	Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada PKT dan Ketua YKHT sebagai PS
	4	1.000	Ketua Komite Audit maupun GCG, PMRI adalah salah satu anggota Dekom, yaitu Bpk. Agus Subekti dan Bpk. Amarullah
80	1	1.000	Keseluruhan Komite Dekom PT KIE memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup terlihat dari CV dari masing-masing komite
	2	1.000	Anggota komite audit PT KIE yaitu Bp. Heru Harjanto, Bpk. Turkhamim dan Bp Dormatua berasal dari luar Perusahaan (berasal dari PT Pupuk Kaltim)
	3	1.000	Jumlah keanggotaan Komite Dekom PT KIE yang berasal dari luar Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
81	1	1.000	Telah terdapat Piagam Komite Audit yang telah disahkan dengan No. KEP-03/DEKOM/KIE/III.2017 tanggal 29 Maret 2017. Untuk piagam Komite GCG, PMR dan Investasi ditetapkan melalui SK Dekom KEP-01/DEKOM/KIE/X/2018
	2	1.000	Muatan Piagam Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Dekom
	3	1.000	Terdapat rka komite audit dan komite GCGPMRInvestasi tahun 2018 yang di tandatangi seluruh anggota komite dan Dekom
82	1	0.250	Sesuai RKA Dekom komite Audit merencanakan rapat 3 bulan sekali pada tahun 2018, sedangkan untuk Komite GMRI merencanakan rapat 6 bulan sekali di tahun 2018. Namun notulen rapat belum terlihat sesuai dengan yang direncanakan, hanya ada beberapa notulen Rapat komite. sesuai kegiatan  Komite juga melakukan rapat bersama Manajemen PT KIE seperti pembahasan RKAP, progress proyek
	2	0.500	Sesuai RKA Dekom komite Audit merencanakan rapat 3 bulan sekali pada tahun 2018, sedangkan untuk Komite GMRI merencanakan rapat 6 bulan sekali di tahun 2018. Namun notulen rapat belum terlihat sesuai dengan yang direncanakan, hanya ada beberapa notulen Rapat komite. sesuai kegiatan

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			Komite juga melakukan rapat bersama Manajemen PT KIE seperti pembahasan RKAP, progress proyek
83	1	0.250	Laporan Komite disampaikan secara lisan pada saat rapat ataupun di grup WA
	2	0.000	Belum terdapat laporan triwulan dan tahunan ke Dekom

#### 4.Aspek Direksi

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
84	1	1.000	Penggantian Dirut PT KIE dari Bapak Bagus Subekti kepada Bapak Illiana Arifiandi telah dilaksanakan pada 4 April 2017 di Hotel Equator yang dihadiri oleh manajemen PT KIE dan PT Pupuk Kaltim bersamaan dengan pengenalan Dewan Komisaris PT KIE yang baru.
	2	1.000	Seluruh Direksi hadir pada program pengenalan Direksi yang baru pada 4 April 2017
	3	1.000	Seluruh Direksi menghadiri program pengenalan Direksi baru yang dilaksanakan oleh perusahaan
85	1	1.000	Perusahaan telah memiliki Kebijakan tentang pelatihan bagi Direksi yang tertuang dalam SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dewan Direksi PT KIE poin 2 halaman 3.
	2	0.500	Direksi belum membuat RKAT tersendiri namun anggaran pelatihan sudah jadi satu di RKAP program pelatihan
	3	1.000	Selama 2018 pelaksanaan pelatihan Direksi sesuai RKAT sebanyak 1 kali.  Direksi telah membuat hasil pelatihan yang diikuti (Sefin M sertifikasi Qualified Risk Management Professional QRMP) dilaksanakan di bandung 23 Juli 2018
86	1	1.000	Perusahaan telah memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan Perusahaan yang tertuang dalam SK Direksi Nomor: 14/DIR/X-2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Struktur Organisasi PT KIE
	2	0.500	Direksi belum menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi namun dalam akta risalah RUPS LB sudah disebutkan pemangku jabatan masing-masing Direksi.
	3	1.000	Perusahaan sudah memiliki deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi yang isinya terdiri dari: identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas dan tanggung

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			jawab, wewenang, hubungan kerja, kondisi dan lingkungan kerja dan persyaratan jabatan. Sesuai SK Direksi Nomor: 14/DIR/X-2017 tanggal 2 Oktober 2017
	4	1.000	Direksi PT KIE telah meminta persetujuan Dekom atas perubahan SO sesuai surat Dirut PT KIE Nomor: 24.01/DU/KIE.B/IX/2017 tanggal 7 September 2017 dan disetujui oleh Dekom sesuai surat Dekom Nomor : 05/KU/KIE/IX/2017 tanggal 27 September 2017
87	1	1.000	Perusahaan telah memiliki pedoman penyusunan prosedur dan instruksi kerja sesuai SK Direksi Nomor : 19/SKD/DIR/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018
	2	1.000	Proses bisnis inti perusahaan sudah memiliki SOP untuk melaksanakan kegiatan perusahaan antara lain: 1. Kawasan 2. Beton 3. Properti 4. Proyek Komersil 5. Trading.
	3	1.000	Sosialisasi SOP kepada seluruh karyawan sudah dilakukan melalui media email ke seluruh karyawan.
	4	0.000	Hasil audit yang dilakukan oleh SPI, SOP untuk proses bisnis inti perusahaan sudah dilakukan namun masih ada temuan terkait Prosedur penjualan dan penagihan, pengadaan jasa & barang, pembuatan kontrak.
	5	1.000	Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala dari hasil temuan audit
88	1	1.000	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait mekanisme pengambilan keputusan Direksi yang tertuang pada SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 lampiran poin 3 tentang Kebijakan Pengambilan Keputusan Dewan Direksi
	2	1.000	Direksi telah memiliki standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi yaitu 5-7 hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima lengkap sesuai SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 lampiran no 3 tentang Kebijakan Pengambilan Keputusan Dewan Direksi poin c .
	3	1.000	Sesuai arahan Direksi setiap keputusan atas tindakan perusahaan selalu menyertakan kepala divisi dan manager sehingga saat itu juga keputusan bisa dikomunikasikan dengan pejabat dibawah Direksi.
89	1	1.000	Perusahaan telah memiliki kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang memadai sesuai SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 tanggal 21 Desember 2017 lampiran poin 4 tentang Kebijakan Penyusunan RJPP
	2	1.000	Perusahaan telah memiliki rancangan RJPP dan telah disahkan menjadi RJPP yang berlaku dari 2016 sd 2020
	3	1.000	Proses telaah yang dilakukan oleh Direksi atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim RJPP dan dibahas bersama dewan Komisaris
	4	0.000	Untuk RJPP tahun 2016-2020 telah disahkan pada 22 Januari 2018 dalam RUPS kinerja thn 2017 namun penyampaian rancangan RJPP sudah terlambat.
	5	1.000	Direksi telah melakukan sosialisasi RJPP 2016-2020 kepada seluruh karyawan yang dihadiri oleh Kepala Divisi, Manajer sampai dengan



PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			pejabat eselon IV serta melibatkan serikat pekerja (karyawan).
90	1	1.000	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran yang tertuang pada SK Dewan Direksi Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 lampiran no 5 tentang Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Direksi
	2	1.000	Perusahaan telah memiliki Rancangan RKAP sesuai dengan pedoman penyusunan dan merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan sudah disampaikan kepada PS tanggal 28 September 2017 sesuai surat Dirut KIE Nomor : 32.01/DU/KIE-B/IX/2017 tentang penyampaian draft RKAP 2018.
	3	1.000	Rancangan RKAP yang disusun oleh tim dilakukan telaah oleh Direksi dan dibahas bersama dengan Dekom dalam rapat gabungan antara Dekom dan Direksi ,hasil telaah telah mempertimbangkan masukan Dekom. Pembahasan dilakukan seluruh Direksi dan Dekom serta perangkat Dekom sesuai risalah rapat yang dilakukan pada 27 September 2017
	4	1.000	Direksi menyampaikan rancangan RKAP tahun 2018 kepada Pemegang Saham pada tanggal 28 September 2017 sesuai surat Dirut KIE kepada PS No; 32.01/DU/KIE-B/IX/2017 dan sudah dilakukan telaah oleh Dekom sesuai Surat Dirut kepada Dekom tanggal 19 September 2017 Nomor ; 30.01/DU/KIE-B/IX/2017
	5	1.000	Sosialisasi RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan telah dilaksanakan pada 09 februari 2018 sesuai surat undangan Dirut PT KIE Nomor :02.02/DU/KIE-B/II/2018.
91	1	1.000	Perusahaan telah memiliki Surat Keputusan Direksi terkait Struktur Organisasi PT KIE Nomor : 14/DIR/X-2017 dan prosedur rotasi, mutasi, promosi (RMP) jabatan dan penugasan yang sudah ditandatangani oleh Direksi PT KIE pada 5 Oktober 2017 No.Dok : SDM-001
	2	1.000	Perusahaan sudah menempatkan karyawan pada setiap level dalam organisasi perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan dilakukan asesmen oleh konsultan independen.
	3	1.000	Perusahaan telah memiliki database tentang kompetensi seluruh karyawan yang sudah diasesmen oleh konsultan independen (kharisma Samarinda)
	4	1.000	Promosi dan mutasi satu level dibawah Direksi dibahas dalam rapat intern Direksi kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuh dimintakan arahan Dekom. Saat pengangkatan Sanhari sebagai Kadiv operasi
	5	0.500	Persepsi responden
92	1	1.000	Direksi merespon usulan bisnis dari manajemen dibawah Direksi terkait investasi/proyek di Tanjung Selor dan lingkungan PKT. Usulan bisnis tersebut harus menyertakan FS, analisa cost benefit dan kajian risiko,

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			kemudian dibahas dalam rapat internal Direksi. Unit kerja membuat presentasi kemudian disampaikan kepada Direksi dan dimintakan persetujuan Dekom.
	2	1.000	Atas usulan peluang bisnis yang disampaikan Direksi membahas dalam rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi.
	3	1.000	Setiap usulan peluang bisnis yang disampaikan Kepada Dekom disertakan FS, legal opinian, analisa cost benefit, kajian risiko dan dibahas dalam rapat antara Dekom dan Direksi.
	4	1.000	Pada 2018 Usulan peluang bisnis yang disampaikan kepada Dekom belum terlambat untuk ditindaklanjuti
	5	1.000	Peluang bisnis atau proyek yang diusulkan memberikan manfaat untuk perusahaan
93	1	1.000	Telah ada mekanisme pembahasan isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar bagi perusahaan yang dilakukan dalam rapat internal Direksi, kepala Divisi, manajer yang dilaksanakan dalam rapat antara Dekom dan Direksi.
	2	1.000	Pembahasan mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan selalu dibahas dalam rapat internal Direksi dan melibatkan Kepala Divisi serta manager.
	3	1.000	Direksi menyampaikan hasil pembahasan perubahan lingkungan bisnis yang berdampak pada usaha perusahaan kepada Dekom dalam rapat gabungan antara direksi dan Dekom.
	4	1.000	Perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak signifikan pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan selalu direspon oleh Direksi dan manajemen.
94	1	1.000	Semua program/kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan RKAP dan telah melalui mekanisme yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
	2	1.000	Telah ada analisis yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah yang signifikan
	3	1.000	Proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Direksi dilaksanakan tepat waktu yaitu 7 hari sesuai pedoman/mechanisme tentang pengambilan keputusan.
95	1	1.000	Perusahaan telah memiliki pedoman penilaian kinerja serta penjelasan mengenai indikator kinerja dan rumus-rumusnya, cara penilaian sesuai yang tertuang dalam SK Direksi Nomor: 34/DIR/XI-2015
	2	1.000	Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi telah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi serta memenuhi unsur relevansi, kelengkapan, ketepatan dan fairness
	3	1.000	Sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer.

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
96	1	1.000	Telah ada target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi yang tertuang dalam setiap KPI unit Kerja maupun KPI Individu.
	2	1.000	Perusahaan telah memiliki kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam bentuk KPI tiap jabatan..
97	1	1.000	Setiap masing-masing divisi membuat laporan kinerja kepada Direksi setiap bulan  Terdapat pembahasan atas kinerja masing-masing divisi yang dilakukan saat rapat koordinasi tiap bulan
	2	1.000	Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi pada saat rapat koordinasi yang dilaksanakan tiap bualan yang diikuti Direksi, Kepala Divisi , Manager dan Serikat Pekerja
98	1	1.000	Direksi menyusun dan melaporkan laporan kinerja perusahaan berdasarkan target kolegiat setiap bulan dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dengan cc Dekom
	2	0.750	Tingkat pencapaian kinerja Direksi sampai bulan Desember 2018 sesuai kontrak manajemen dengan perolehan sebesar 87,05% dengan predikat baik
	3	0.000	Direksi belum menyusun dan menyampaikan kepada Dekom mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi
	4	1.000	Tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi secara kolegiat saja secara individu tidak disyaratkan oleh Pemegang Saham
99	1	1.000	Berdasarkan risalah RUPS kinerja 2017 pemegang saham telah menyetujui adanya insentif kinerja sebesar Rp. 2.097.900.000 untuk karyawan, sedangkan untuk Direksi mengikuti peraturan penugasan dari PKT karena sebagai karyawan PKT.
	2	1.000	Penentuan usulan insentif kinerja sudah mencerminkan kesesuaian dengan kinerja atau KPI yang dicapai.
100	1	1.000	PT KIE telah memiliki kebijakan TI sesuai Keputusan Direksi PT KIE nomor: 30/SKD/DIR/XII.2017 tentang kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi PT KIE tanggal 21 Desember 2017
	2	0.000	Teknologi sudah diterapkan namun belum memiliki ITMP
	3	0.000	PT KIE belum pernah dilakukan audit terkait TI
	4	0.500	PT KIE sudah memiliki website sendiri, dan beberapa aplikasi lain secara garis besar penerapan TI sudah sesuai kebutuhan perusahaan. Namun belum ada rencana tertulis
	5	0.000	Belum terlihat laporan pelaksanaan istem teknologi informasi

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
101	1	0.500	PT KIE belum memiliki kebijakan khusus terkait Standar Pelayanan Minimum, tetapi sudah terdapat draft dan dijelaskan pada saat penandatanganan kontrak
	2	1.000	PT KIE sudah memiliki kebijakan Mutu yang ditandatangani oleh Dirut PT KIE tanggal 6 Februari 2018 sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 tahun 2008. Sistem pengendalian mutu diterapkan secara konsisten dan secara berkala sistem mutu diaudit dan perusahaan sudah menindak lanjuti setiap ketidaksesuaian mutu
	3	1.000	PT KIE menindaklanjuti keluhan dari pelanggan dari Perusahaan yang menyewa di Gedung KIE. Sebagian keluhan telah ditindaklanjuti
102	1	1.000	PT KIE telah memiliki Prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai dengan nomor SK Direksi PT KIE No: 33.07/SKPTS/DIR/KIE/X/2005 tentang prosedur pengadaan barang dan jasa
	2	0.500	Pedoman /Kebijakan tidak terdapat di website Perusahaan, tetapi PT KIE telah menampilkan syarat menjadi rekanan
	3	1.000	Terdapat laporan mengenai pengadaan barang, jasa dan pergudangan setiap bulannya.
	4	1.000	Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dengan cara tender terbuka, para rekanan diundang secara bersamaan kemudian dilakukan penawaran.
	5	0.500	PT KIE sudah memiliki HPS dengan perhitungan secara keahlian dan bisa dipertanggungjawabkan, namun nilai HPS tidak dipublikasikan.
	6	1.000	PT KIE telah memiliki prosedur PPU-PCR-001 yaitu pedoman pengadaan barang dan jasa tanggal 07 November 2015
	7	0.500	Dalam audit yang dilakukan tahun 2017 terdapat 3 temuan (terkait pengadaan barang/pasir)
	8	0.500	Persepsi responden terhadap tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa (kuesioner).
103	1	0.500	PT KIE belum memiliki kebijakan tentang pendidikan dan latihan, namun sudah memiliki rencana kerja yang diusulkan setiap tahunnya di RKAP. Setelah pelatihan sudah dilakukan evaluasi.
	2	0.750	PT KIE sudah memiliki program pengembangan SDM melalui training yang diusulkan oleh manajer masing-masing unit kerja, sudah dilaksanakan program tersebut kemudian dievaluasi dan tingkat keberhasilannya sudah sesuai peraturan perusahaan. PT KIE telah memiliki prosedur pelatihan bagi karyawan PT KIE
	3	1.000	Perusahaan sudah memiliki kebijakan terkait Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang disahkan oleh Dirut pada tanggal 6 Februari 2018. Perusahaan sudah memberikan fasilitas kesehatan terhadap pekerja dan keluarga. Alat keselamatan kerja, manajemen K3, sertifikasi K3 serta fasilitas kesehatan di lingkungan kerja sudah tersedia di perusahaan, perusahaan juga sudah melakukan

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			evaluasi terhadap K3 serta menindaklanjuti hasil evaluasi.
	4	1.000	PT KIE memiliki kebijakan KPI sesuai dengan nomor 34/DIR/XI-2015 tentang penilaian KPI tanggal 11 November 2015
	5	1.000	Perusahaan sudah memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi dan melewati penjarangan, asesmen yang dilakukan oleh komite SDM dan melibatkan konsultan independen
	6	1.000	PT KIE sudah memiliki kebijakan mengenai penerapan remunerasi dan kesejahteraan yang tertuang didalam SK DIR No: 16/SKD/DIR/X-2017 tentang sistem pengupahan berbasis kompetensi dan kinerja tanggal 2 Oktober 2017. Kebijakan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (karyawan dan keluarga sudah diikutkan program BPJS dan kapitasi YRS PKT).
	7	1.000	Perusahaan menerapkan reward and punishment atas penerapan Pedoman Perilaku dan disiplin sesuai SK DIR No: 10/DIR/VIII-2016
	8	1.000	PT KIE telah memiliki SK Direksi Nomor: 25/SKD/DIR/XII-2017 tentang kebijakan pengendalian informasi tanggal 21 Desember 2017
104	1	1.000	PT KIE telah memiliki kebijakan SK Nomor: 27/SKD/DIR/XII-2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Anak Perusahaan (Subsidiary Governance) dan Perusahaan patungan PT KIE tanggal 21 Desember 2017
	2	1.000	Terdapat proses penjarangan penetapan Direksi Anak Perusahaan, sesuai contoh yang tercantum pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kaltim Adighuna Dermaga pada hari selasa tanggal 14 Agustus 2018
	3	1.000	Penetapan target kinerja dan realisasi kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan dilaksanakan sesuai dengan penerbitan yang telah ditetapkan RUPS anak perusahaan contoh Keputusan RUPS tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun Buku 2019 PT Kaltim Adhiguna Dermaga pada Jakarta 1 Oktober 2018
	4	1.000	Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dan perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan atas persejuaan PS (PT KIE) dan ditetapkan didalam Keputusan RUPS Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris .
105	1	1.000	Perusahaan telah memiliki sistem dan prosedur akuntansi PT Kaltim Industrial Estate berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 13.07/SKPTS/DIR/KIE/VIII/2005
	2	1.000	Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sudah diterapkan secara konsisten dan tidak ada temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			pengungkapan kebijakan akuntansi.
	3	1.000	Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan PT KIE sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan diterbitkan tepat waktu.
	4	1.000	Hasil opini auditor independen atas penyajian laporan keuangan PT KIE yang dilakukan oleh PWC kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
106	1	1.000	PT KIE telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang tercantum pada SK Direksi PT KIE Nomor: 10/SKD/DIR/V-2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko tanggal 15 Mei 2017
	2	1.000	Sesuai dengan SK DIR no 29/SKD/DIR/XII-2017 tentang Tim Pemantau Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik GCG dan Manajemen Risiko PT KIE tanggal 2 Desember 2017, Pelaksanaan GCG dan MR di PT KIE dibawah tanggung jawab Direktur Utama
	3	1.000	Kebijakan tersebut di Distribusikan melalui email karyawan
	4	1.000	Rencana implementasi pengelolaan manajemen risiko terdapat pada RKAP tahun buku 2018
	5	1.000	Sesuai dengan laporan manajemen risiko 2018, Direksi telah melaksanakan progrma manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko dan proses bisnis
	6	1.000	Pengimplementasi Manajemen risiko masuk pada RKAP 2018 PT KIE, pada 2018 terdapat pemantauan terhadap program manajemen risiko
	7	0.500	Persepsi responden terhadap tingkat kesungguhan kepedulian Direksi terhadap risiko (risk awareness) (Kuesioner).
	8	0.000	Belum dilakukan
107	1	1.000	Terdapat Piagam SPI PT KIE yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Kepala SPI pada tanggal 3 April 2017, yang berisikan kerangka pengendalian intern
	2	1.000	Terdapat pada surat pernyataan taggung jawab atas laporan konsolidasian PT Kaltim Industrial Estate dan Entitas Anak yang berakhir tgl 31 Desember 2016. Direksi yang menandatangani adalah Direktur Utama (Bagus Subekti) dan Direktur Keuangan (Sefin Martadjaja).  Dalam surat pernyataan terdapat pernyataan pertanggung jawaban isi dari laporan keuangan. Surat pernyataan di tandatangani tgl 2 Maret 2017
	3	1.000	Terdapat pada laporan keuangan yang telah di ttd Direksi
	4	0.000	Tidak terdapat evaluasi efektivitas pengendalian intern
	5	0.000	Belum ada laporan internal control di PT KIE
108	1	1.000	Terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal pada laporan SPI triwulanan

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	2	0.000	PT KIE belum melaporkan tindak lanjut pemeriksaan dan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris
	3	0.500	Status tindak lanjut audit internal: selesai: 11 pantau: 10 total selesai 64%
	4	0.500	Persepsi responden terhadap tingkat komitmen yang tinggi dari Direksi dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor (kuesioner).
109	1	1.000	Fungsi sekretariat dan legal dibawah Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan fungsi mengelola aktivitas unit kerja hukum dan kehumasan guna mendukung kelancaran operasional perusahaan sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan job description staf sekretariat dan legal PT KIE
	2	1.000	PT KIE membuat kajian hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
110	1	1.000	PT KIE memiliki pendapat hukum (legal opinion) tentang permasalahan hukum yang terjadi di PT KIE. Legal opinion dibuat oleh Staf Legal PT KIE . Contoh legal opinion pada tahun 2018 terdapat pada tgl 23 November 2018
	2	1.000	terdapat Kajian risiko hukum dan mitigasi atas risiko yang dihadapi
	3	1.000	PT KIE melakukan bantuan hukum untuk kasus litigasi dan non litigasi dengan bantuan konsultan hukum yang ditunjuk Perusahaan
	4	1.000	Tidak terdapat permasalahan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai poin a-f
111	1	1.000	Terdapat kebijakan mutu, K3 dan lingkungan sesuai dengan Sistem SMK3 pada permenker no.5 /MEN/1996 , Sisetem Manajemen Mutu ISO 9001;2008 serta sistem manajemen lingkungan ISO 14001;2004 secara konsisten yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Meizar Effendi) tanggal 11 Februari 2014.
	2	1.000	Kontak Pelanggan terdapat di website dengan telepon kantor PT KIE. Pelanggan juga dapat mengirimkan pesan melalui website tersebut
	3	1.000	Terdapat di website PT KIE mengenai penyampaian keluhan pelanggan. Terdapat keterangan di Purchase Order mengenai kontak untuk menyalurkan keluhan pelanggan
	4	1.000	Penanganan Keluhan Pelanggan sesuai dengan No: PPM-Gedung-002 tanggal 21 September 2015 Keluhan pelanggan ditulis di log book tiap bulannya untuk masing-masing bagian. PT KIE mendiskusikan sesuai scope pekerjaan
	5	1.000	Keluhan pelanggan dan dilakukan rekaptulasi penanganan keluhan pelanggan gedung Wisma KIE tahun 2018

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	6	1.000	PT KIE telah melakukan survei kepuasan Pelanggan wisma KIE 2018
	7	1.000	Hasil rekomendasi pada survey telah direkap untuk tindak lanjut
	8	0.750	Hasil Survey menunjukkan 83.42 dengan katagori baik
112	1	0.750	<p>PT KIE mengadakan pengadaan dengan sistem mengundang rekanan yang telah mendaftar di PT KIE.</p> <p>PT KIE tidak mempublikasikan pengumuman tender ke media masa seperti koran ataupun website.</p> <p>Rekanan mendaftarkan company profile nya secara manual ke PT KIE. Rekanan yang lolos menjadi rekanan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan</p>
	2	1.000	PT KIE melakukan survey penilaian kontraktor setiap tahunnya. Pada survey mencantumkan QCDS -> Waktu, Administrasi, mutu, dan respon.
	3	1.000	Tidak terdapat keterlambatan pembayaran terhadap pemasok.
	4	1.000	Rekapitulasi penilaian pemasok periode bulan Februari 2017 menunjukkan hasil baik
113	1	0.750	<p>Terdapat kebijakan terhadap kreditur/investor PT KIE yang disahkan pada tanggal 19 September 2017</p> <p>Perusahaan tidak melakukan pinjaman dalam jangka panjang. NA</p>
	2	1.000	Tidak terdapat perbedaan mismatch dalam penggunaan dan penyediaan dana
	3	1.000	PT KIE telah memberikan laporan keuangan konsolidasi kepada BANK atau Kreditur setiap tahunnya, tetapi belum ada surat tertulis dalam penyampaiannya. Secara praktik dilakukan secara rutin.
	4	1.000	PT KIE selalu melakukan pembayaran tepat sesuai/perjanjian
114	1	1.000	Tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen perpajakan dalam tahun 2018
	2	1.000	Tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak PPh, PPN, dan PBB
	3	1.000	Tidak terdapat pelaporan ke dokumen kewajiban lembaga regulator, sehingga Not Aplicable
115	1	0.500	<p>Secara praktik PT KIE mendorong partisipasi karyawan bersama serikat pekerja</p> <p>Diskusi dilaksanakan kepada serikat pekerja dengan manajemen dikantor KIE, untuk notulen hasil diskusi belum diterima</p> <p>Terdapat kebijakan yang dikomunikasikan seperti: remunerasi, kesehatan, asuransi, dana pensiun dsb.</p>
	2	0.500	<p>Survei Kepuasan karyawan telah dilaksanakan</p> <p>Survey kepuasan karyawan telah dilakukan pada tahun 2018</p>



PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			Hasil Survey menunjukkan nilai kepuasan karyawan sebesar 70 Belum dilaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan karyawan
116	1	1.000	terdapat prosedur penanganan Keluhan Pelanggan sesuai dengan Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan (contoh Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan PPM- Gedung-002)
	2	1.000	Mekanisme penanganan keluhan stakeholders dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilaporkan/ direkap setiap triwulan
	3	1.000	Keluhan stakeholders telah dilakukan secara tuntas
117	1	1.000	PT KIE telah memiliki kontrak manajemen yang telah di sahkan dalam pemenuhan arahan RUPS, Hasil pencapaian KPI Perusahaan untuk tahun 2018 memperoleh sebesar 87,05 dengan predikat baik
	2	1.000	Realisasi KPI Perusahaan dilakukan di akhir tahun, Hasil pencapaian KPI Perusahaan untuk tahun 2018 memperoleh sebesar 87,05 dengan predikat baik.
118	1	1.000	Kebijakan tanggung jawab Social dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV) PT KIE Nomor 28/SKD/DIR/XII-2017
	2	1.000	Perusahaan memiliki SOP Kesiagaan dan Tanggap Darurat no Dek:PPU-K3L-004 yang disahkan pada tanggal 11/07/2015 Terdapat program pengetesan Alarm Gedung, pemeriksaan APAR Early warning system terdapat apar, smoke detector, fire alarm, tangga darurat, jalur evakuasi dsb Terdapat infrastruktur baik sebagai early warning system maupun pelaksanaan program keadaan darurat.
	3	1.000	Rencana kerja CSR terdapat pada KPI Sekper yang telah di kirimkan ke Manager SDM sesuai surat 10.02/SEKPER/kie-b/x/2018 tanggal 30 Oktober 2018
	4	1.000	PT KIE telah memiliki masterplan Corporate social responsibility Master Plan 2017-2027 serta dan PT KIE telah melaksanakan Program Kemitraan dengan usaha kecil untuk kegiatan CSRnya
	5	1.000	Indikator kinerja CSR Terdapat pada dokumen masterplan CRK KIE yang ditetapkan pada tahun 2017
119	1	1.000	PT KIE telah memiliki mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan yang diatur pada SK Direksi PT KIE nomor: 6/SKD/DIR/III-2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan yang disahkan pada Maret 2018
	2	1.000	PT KIE telah mensosialisasikan kebijakan benturan kepentingan kepada seluruh karyawan PT KIE Melalui email perusahaan pada 4 April 2018
	3	1.000	Sudah ada Surat pernyataan Direksi terkait dengan benturan kepentingan yang sudah ditandatangani oleh semua direksi yang ditandatangani 10 Januari 2018

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
120	1	1.000	Semua Direksi sudah menyampaikan kepemilikan saham dan sudah menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus yang di tandatangani 10 Januari 2018
	2	0.000	Direksi ataupun Dekom belum membuat penandatanganan Pakta Integritas di setiap pelaksanaan Aksi Korporasi
	3	1.000	Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional dalam tahun 2016 yang mengandung benturan kepentingan.
	4	0.500	Pesepsi responden terhadap tingkat kesungguhan Direksi dalam pengambilan keputusan bebas kepentingan pribadi Direksi dan pihak-pihak lainnya (kuesioner).
121	1	1.000	Direksi menyampaikan laporan kinerja triwulanan dan semesteran serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
	2	1.000	Penyampaian laporan kinerja (triwulanan dan tahunan) dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah tepat waktu, yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham. Pembahasan di lakukan saat Rapat Dekom-Direksi.
	3	1.000	Direksi telah menyampaikan laporan kinerja triwulanan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan kinerja Semesteran dan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. Sesuai surat nomer 02.01/DK/KIE-B/IV/2018 Tanggal 12 April. 07.01/DU/KIE-B/VII/2018 TANGGAL 10 JULI 2018 Dan 11.01/DU/KIE-B/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018
	4	1.000	Penyampaian laporan manajemen dilakukan tepat waktu (laporan kinerja triwulanan 1 bulan setelah triwulanan ybs dan laporan semesteran 1 bulan setelah berakhirnya semester berjalan) kepada Pemegang Saham yaitu tanggal 12 April 2018 untuk TW 1, tanggal 10 Juli 2018 untuk Semester 1 dan 15 Oktober 2018 untuk TW III
	5	1.000	Muatan (content) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan lengkap sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
122	1	1.000	Perusahaan menyampaikan laporan manajemen kepada PS mayoritas dan Minoritas
	2	1.000	Perusahaan telah memberikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
	3	1.000	Persepsi responden terhadap tingkat pemenuhan prinsip perlakuan yang sama dalam pemberian informasi oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemegang saham/pemilik modal (kuesioner).

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
123	1	1.000	Perusahaan telah memiliki pedoman rapat direksi yang diatur dalam SKD Nomor: 26/SKD/DIR/XII-2017 tanggal 21 Desember 2017
124	1	1.000	PT KIE telah memiliki rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas dan di tandatangani seluruh Direksi pada 2 Januari 2018
	2	1.000	Jumlah rapat direncanakan sesuai kebutuhan yaitu sebulan 1x
	3	0.250	Pelaksanaan rapat dilaksanakan 1 bulan 1x, namun risalah yang ada Bulan Februari-April, September.
125	1	0.250	Dalam 4 notulen rapat yang disampaikan, tingkat kehadiran Direksi sebesar 100%. Namun tidak dapat memperlihatkan notulen di bulan lainnya
	2	1.000	Tingkat kehadiran Direksi dalam rapat dengan Dekom sebesar 100%
126	1	0.000	Sesuai risalah rapat belum dilakukan evaluasi terhadap keputusan hasil rapat.
	2	0.000	Belum ada tindak lanjut terhadap pembahasan yang belum selesai dalam rapat sebelumnya.
127	1	1.000	Tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris PT KIE dilakukan secara online pada aplikasi SIMONERA
	2	1.000	Tindak lanjut atas arahan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Direksi sesuai arahan Dewan Komisaris tersebut dan tercantum dalam Risalah rapat Dewan Komisaris - Direksi
128	1	1.000	Telah ada Piagam Satuan Pengawasan Intern yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris Utama dan ditetapkan pada 3 April 2017
	2	1.000	Muatan Piagam Pengawasan Intern yang dimiliki oleh KIE telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bapepam, UU perusahaan dan peraturan pelaksanaannya) Muatan Piagam Pengawasan Intern yang dimiliki oleh KIE telah mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern yang dibuat oleh FK-SPI perusahaan dan/atau Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern atau international Professional Practices Framework of Internal Auditing
	3	1.000	Piagam Pengawasan Intern telah disempurnakan pada 3 April 2017
129	1	1.000	Posisi SPI PT KIE sudah ada di bawah direktur utama berdasarkan SKD No. 14/DIR/X-2017 tanggal 2 Okt 2017, Ka. SPI Masih di pegang oleh Direktur Utama
	2	1.000	Pelaporan secara triwulanan sesuai arahan Dekom secara triwulanan. Untuk pelaporan ke Direksi dilakukan secara tahunan
	3	0.500	Kepala SPI masih kosong dan belum diisi sejak 2015
	4	0.750	Pimpinan Fungsi Audit Internal masih kosong 2 Staf SPI mengikuti pelatihan Audit Dasar I di YPIA Program pengembangan yang SPI lakukan di Tahun 2018 adalah pelatihan Leadership Development Program dan mengikuti seminar nasional internal audit

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	5	1.000	SPI telah memiliki Pedoman Pengawasan Intern sesuai SK Direksi nomor: 22/DIR.XII-2016 tanggal 8 Desember 2016, telah dilakukan reuiu pada tahun 2018 tetapi belum disahkan
130	1	1.000	Terdapat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI PT KIE tahun 2018 telah dengan pendekatan risiko (risk based audit) yang di tandatangani pada 1 November 2017
	2	0.750	Laporan hasil audit telah disampaikan kepada Dirut sesuai surat 02.02/SPI/I/2019 tanggal 8 Januari 2019, namun tidak dikirimkan ke Dekom hanya ke unit kerja terkait yang di audit
	3	1.000	Sesuai laporan SPI TW I, SPI melakukan reuiu prosedur untuk perbaikan GCG. SPI membantu supporting dalam assessment GCG dan Manrisk
	4	1.000	Tercantum dalam Laporan Hasil Audit masing-masing Unit Kerja (terlihat dalam rekomendasi yang disampaikan)
	5	1.000	SPI PT KIE telah melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut hasil Audit internal dan Eksternal dan telah mendokumentasikan hasil tindak lanjut tersebut dan telah di laporkan kepada Direktur Utama cc Komite Audit
	6	0.500	Persepsi responden terhadap tingkat penerapan rekomendasi yang disampaikan oleh SPI diterapkan/dijalankan dan direkomendasi oleh SPI memperbaiki kegiatan operasional di unitnya (kuesioner).
131	1	1.000	Sekper telah memiliki kompetensi di bidang GCG dan Risk Management, korporasi
	2	1.000	Dalam SKD No. 14/DIR/X-2017 tgl 2 Oktober 2017 ttg struktur organisasi, Sekper berada di bawah Direktur Utama
	3	1.000	Tugas sekper terdapat dalam Board Manual dan Job Desc Sekper telah meliputi hal-hal tersebut
132	1	1.000	Penyusunan Laporan Manajemen triwulanan dan tahunan di koordinasi dan dilakukan oleh divisi Keuangan
	2	1.000	Sekper telah mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan stakeholders a.l press conference, dengar pendapat dengan anggota Dewan, dsb.
	3	0.500	Sekretaris perusahaan telah menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan rapat Direksi.
	4	1.000	Telah dilakukan program pengenalan bagi Anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang baru
	5	0.500	Sekretaris perusahaan telah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama secara bulanan
133	1	1.000	Berdasarkan hasil wawancara Dirut sudah sudah melakukan evaluasi atas kinerja Sekper
	2	1.000	Berdasarkan hasil KPI Sekper untuk 2018 sebesar 3,67 dan ditandatangani oleh Dirut
134	1	0.750	Surat undangan RUPS belum dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			Surat undangan RUPS telah mencantumkan tanggal, waktu, tempat, agenda rapat
	2	0.500	RUPS RKAP dilaksanakan pada 22 Januari 2018  RUPS Kinerja Dilaksanakan pada 16 Mei 2018
135	1	1.000	Dalam panggilan RUPS telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara serta bahan RUPS telah disampaikan sebelum pelaksanaan RUPS
	2	1.000	penjelasan terkait metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium bagi setiap Dewan Komisaris dan Direksi dilampirkan terpisah (namun ada statement di risalah tersebut)
	3	1.000	Terdapat informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan
	4	1.000	Terdapat informasi keuangan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
	5	1.000	Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum RUPS atau maksimal saat RUPS
	6	1.000	Penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Persero dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan

### 5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
136	1	1.000	Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pengendalian
	2	1.000	Kebijakan Pengendalian Informasi sesuai SK Direksi No: 25/SKD/DIR/XII-2017 tanggal 21 Desember 2017 memuat antara lain kategori informasi, jenis informasi, pihak yg bertanggung jawab, informasi kepada stakeholders harus melewati unit kerja Humas.
137		1.000	Perusahaan telah mengendalikan informasi perusahaan sesuai dengan kebijakan antara lain: penyajian informasi dalam website, penyampaian informasi berupa laporan-laporan kpd Dekom dan PS serta stakeholders lainnya sesuai dgn kebutuhan.
138	1	1.000	Perusahaan telah memiliki website dengan alamat <a href="https://kie.co.id">https://kie.co.id</a> dan dapat diakses secara mudah, <a href="https://www.facebook.com/kiebontang">FB.com/kiebontang</a> , <a href="https://www.instagram.com/kiebontang">ig.kiebontang</a>

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	2	1.000	Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran website yang tertuang dalam SK Dewan Direksi PT KIE Nomor : 24/SKD/DIR/XII-2017
	3	1.000	Pengelolaan website sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
139	1	1.000	PT KIE sudah memiliki website perusahaan dan sudah mempublikasikan kebijakan dan informasi perusahaan antara lain: GCG, Kode Etik, program CSR, Profil Dekom dan Direksi,
	2	1.000	Website perusahaan sudah menampilkan informasi penting seperti kegiatan CSR, visi, misi, rencana strategis, pengadaan, dan informasi penting lainnya
140	1	1.000	Terdapat mading Perusahaan, Grup WA, untuk mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan
	2	1.000	Terdapat gathering dengan stakeholders pada sesnin, 9 Juli 2018
141		1.000	Informasi Perusahaan pada Website di mutakhirkan secara berkala
142	1	1.000	PT KIE sudah memiliki website yang sudah mencantumkan pedoman perusahaan dan dapat didownload. Website pada alamat <a href="http://www.Kie.co.id">www. Kie.co.id</a>
	2	1.000	Tidak terdapat permintaan/permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang bersangkutan.
143	1	0.250	PT KIE belum memiliki laporan tahunan
	2	0.000	pada website PT KIE belum terdapat laporan tahunan
144	1	0.250	Belum terlihat perbandingan informasi keuangan selama 5 tahun buku
	2	1.000	Tidak ada ikhtisar Saham dan Obligasi dikarenakan KIE bukan perusahaan terbuka (tidak terdaftar di bursa efek) dan tidak menerbitkan obligasi (NA)
	3	1.000	Tidak ada ikhtisar Saham dan Obligasi dikarenakan KIE bukan perusahaan terbuka (tidak terdaftar di bursa efek) dan tidak menerbitkan obligasi (NA)
145	1	0.000	Laporan Dewan Komisaris belum dilengkapi
	2	1.000	Laporan Direksi terdapat pada halaman 11
	3	0.500	Terdapat tandatangan seluruh anggota Direksi, namun belum terdapat tandatangan Dewan Komisaris
146	1	1.000	Terdapat penjelasan pada halaman 16
	2	1.000	Terdapat penjelasan pada halaman 16
	3	1.000	Terdapat penjelasan pada halaman 18
	4	1.000	Terdapat penjelasan pada halaman 21
	5	1.000	Terdapat penjelasan pada halaman 17
	6	1.000	Terdapat penjelasan pada halaman 22
	7	1.000	Terdapat penjelasan pada halaman 24
	8	1.000	Terdapat penjelasan pada halaman 27
	9	1.000	Komposisi pemegang sudah dicantumkan pada laporan tahunan yaitu

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
			99,9% adalah PT Pupuk Kaltim dan 0,01% adalah YKHT
	10	1.000	Terdapat pada halaman 19
	11	1.000	Terdapat pada halaman 8, NA
	12	1.000	Terdapat pada halaman 8, NA
	13	1.000	NA
	14	1.000	Terdapat pada halaman 73
	15	1.000	Terdapat pada halaman 20
	16	0.000	NA, PT KIE tidak membuat laporan Tahunan (Annual Report)
147	1	1.000	Terdapat pada halaman 30
	2	0.500	Belum ada aktiva lancar, kewajiban lancar, belum ada laba/rugi
	3	0.000	Belum ada laporan
	4	0.000	Belum ada laporan
	5	0.000	Belum ada laporan
	6	0.000	Belum ada laporan
	7	0.000	Belum ada laporan
	8	0.000	Belum ada laporan
	9	0.000	Belum ada laporan
	10	0.000	Belum ada laporan
	11	0.000	Belum ada laporan
	12	0.000	Belum ada laporan
	13	0.000	Belum ada laporan
	14	0.000	Belum ada laporan
	15	1.000	Terdapat pada halaman 30
	16	0.000	Belum ada laporan
	17	0.000	Belum ada laporan
148	1	0.000	NA, PT KIE tidak membuat laporan Tahunan (Annual Report)
	2	0.500	Pembagian tugas dekom di halaman 60 frekuensi pertemuan halaman 65, remunerasi tidak ada , program pelatihan tidak ada
	3	1.000	Nama dan jabatan pada halaman 53, wewenang dan tanggungjawab halaman 54, tugas komite halaman 55, independensi hal 56
	4	0.000	Belum ada di laporan
	5	0.000	Komite GMRI tidak tertuang di Laporan Tahunan
	6	1.000	Terdapat pada halaman 63
	7	1.000	Terdapat pada halaman 65
	8	0.750	Tedapat halaman 65-68, kurang Nama dan riwayat Kepala SPI

PRM	FUK	SKOR FUK	SIMPULAN PENILAIAN PARAMETER
	9	0.250	Bab manajemen risiko ada, namun belum mencakup kriteria
	10	0.500	Informasi pusat pengaduan terdapat pada halaman 72, namun belum terdapat program peningkatan layanan
	11	1.000	Terdapat pada halaman 74
	12	1.000	Terdapat pada halaman 76
	13	0.000	Belum ada di laporan
	14	1.000	Terdapat di halaman 71
	15	0.000	Belum ada di laporan
149	1	1.000	Terdapat pada halaman 82
	2	1.000	Terdapat di halaman 88
	3	1.000	Terdapat di halaman 88
	4	1.000	Terdapat di halaman 85
	5	1.000	Terdapat di halaman 85
150	1	1.000	NA
	2	1.000	NA
151	1	0.250	Perusahaan mendapatkan Proper Biru dan Zero Accident, namun penghargaan terkait CSR belum ada
	2	0.000	Belum terdapat penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi